



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024



BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KATA PENGANTAR

Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sesuai amanat dari Instruksi Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dalam penyusunannya berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Instansi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atas penggunaan anggaran Tahun 2024.

Akhirnya, kami berharap semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian dan pembangunan, khususnya di Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

Tanjungpinang, 19 Februari 2025
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



MISNI, S.K.M.,M.Si
Pembina Utama Madya
NIP 197305161990032007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vii
RINGKASAN EKSKUTIF	ix
PENGHARGAAN DAN PRESTASI	xi
BAB I	
Latar Belakang	1
Maksud dan Tujuan	2
Tugas Fungsi dsn Struktur	3
Sumber Daya Manusia.....	13
Sarana dan Prasarana	17
Permasalahan dan Isu Strategis	19
BAB II	
Perencanaan Strategis	26
Perjanjian Kinerja	31
BAB III	
Akuntabilitas Kinerja	43
Sasaran: Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	46
Indikator Indeks Perencanaan	46
Capaian Kinerja	59
Faktor Pendukung Keberhasilan	60
Faktor Penghambat	63
Upaya Perbaikan	63
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung ...	64

Sasaran: Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah dan Indeks Inovasi Daerah	66
Indikator Persentase Hasil riset yang Direkomendasikan	66
Capaian Kinerja	69
Faktor Pendukung Keberhasilan	72
Faktor Penghambat	73
Upaya Perbaikan	74
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung ...	74
Sasaran: Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	75
Indikator Nilai SAKIP	75
Capaian Kinerja	78
Faktor Pendukung Keberhasilan	81
Faktor Penghambat	84
Upaya Perbaikan	85
Indikator IKM Bappeda	85
Capaian Kinerja	98
Faktor Pendukung Keberhasilan	100
Faktor Penghambat	100
Upaya Perbaikan	101
Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Pendukung ...	101
Realisasi dan Efisiensi Anggaran	103
BAB IV	
Penutup	110

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang dan Non ASN Per Desember Tahun 2024	13
Tabel 1.2	Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	15
Tabel 1.3	Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	16
Tabel 1.4	Jumlah Sarana dan Prasarana Menurut Kondisi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	17
Tabel 1.5	Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong Layanan Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah	22
Tabel 2.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026	30
Tabel 2.2	Target Kinerja Tahun 2024 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	31
Tabel 2.3	dan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	32
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	40
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	41
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Capaian Kinerja (CK) Serta Hasil dan Penjelasan	43
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	45
Tabel 3.3	Rangkuman Kertas Kerja Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi	49
Tabel 3.4	Kriteria Predikat Kualitas Perencanaan Berdasarkan Hasil Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi	50
Tabel 3.5	Hasil Penilaian Aspek Ketersediaan Dokumen/Data untuk Pemerintah Provinsi	52
Tabel 3.6	Rekap Hasil Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi	53
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	59
Tabel 3.8	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Tahun 2023	59

Tabel 3.9	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	60
Tabel 3.10	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau dengan Rata-Rata Nasional	60
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	70
Tabel 3.12	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dan Tahun 2024	70
Tabel 3.13	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	71
Tabel 3.14	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rata-Rata Nasional	72
Tabel 3.15	Rentang Nilai SAKIP	76
Tabel 3.16	Hasil Penilaian Komponen SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	79
Tabel 3.17	Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	79
Tabel 3.18	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan Periode Sebelumnya	80
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	81
Tabel 3.20	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rata-Rata Nasional	81
Tabel 3.21	Kategori dan Nilai Persepsi Jawaban Survei Kepuasan Masyarakat	87
Tabel 3.22	Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Bappeda	88
Tabel 3.23	Jumlah Responden	81
Tabel 3.24	Standart Interpretasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat	96
Tabel 3.25	Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	96
Tabel 3.26	Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	98

Tabel 3.27	Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan Periode Sebelumnya	98
Tabel 3.28	Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra	99
Tabel 3.29	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rata-Rata Nasional	99
Tabel 3.30	Realisasi Keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024	105
Tabel 4.1	Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023	111

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Menurut Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023	3
Gambar 1.2	Diagram Persentase Perbandingan Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang dan Non ASN Per Desember Tahun 2024	14
Gambar 1.1	Perbandingan Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	15
Gambar 1.4	Diagram Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	17
Gambar 2.1	<i>Cascading Misi, Tujuan RPJMD, Sasaran RPJMD, Tujuan Renstra dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau</i>	28
Gambar 3.1	Rumus Capaian Kinerja	43
Gambar 3.2	Capaian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024	44
Gambar 3.3	Hierarki IPPN Pemerintah Provinsi	48
Gambar 3.4	Tahapan Penilaian IPPN Tahun 2024	50
Gambar 3.5	Dokumentasi Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dalam Desk Penilaian IPPN Tahun 2024	51
Gambar 3.6	Dokumentasi Badan Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau dalam Forum – Forum Koordinasi Bersama Pemerintah Pusat	61
Gambar 3.7	Dokumentasi Badan Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau dalam Forum – Forum Koordinasi Bersama Perangkat Daerah	62
Gambar 3.8	Dokumentasi Badan Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pelaksanaan Musrenbang	63
Gambar 3.9	Rumus Perhitungan Indeks Inovasi Daerah	69
Gambar 3.10	Dokumentasi Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Mendampingi Perangkat Daerah pada Optimalisasi Partisipasi dalam Kelitbangan dan Inovasi	73
Gambar 3.11	Siklus SAKIP	75
Gambar 3.12	Grafik Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	80
Gambar 3.13	Publikasi Laporan Kinerja pada Website Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	82

Gambar 3.14	Desk Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	82
Gambar 3.15	Sertifikat Evaluator Internal Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	83
Gambar 3.16	Dokumentasi Rapat Koordinasi Internal Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	84
Gambar 3.17	Unsur Perhitungan Surveri Kepuasan Masyarakat	86
Gambar 3.18	Tahapan Pelaksanaan Survei	87
Gambar 3.19	Koordinasi dan Penyampaian Rancangan Kegiatan Statistik ke BPS	89
Gambar 3.20	Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik	90
Gambar 3.21	Pelaksanaan Survei Dengan Menggunakan PAPI	92
Gambar 3.22	Pelaksanaan Survei Dengan Menggunakan CAWI	93
Gambar 3.23	Jenis Kelamin dan Pendidikan Responden Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	94
Gambar 3.24	Status Kepegawaian Responden Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau	95
Gambar 3.25	Rumus Nilai Penimbang	95
Gambar 3.26	Rumus SKM	95
Gambar 3.27	Rumus Konversi SKM	95
Gambar 3.28	Diagram Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024	104



Kepulauan Riau

RINGKASAN EKSEKUTIF

PROFIL ORGANISASI

Nama OPD : Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Alamat : Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Gedung D, Pulau Dompak, Tanjungpinang - Kepulauan Riau

Email : bappeda.kepri@gmail.com

Website : <https://barenlitbangkepri.com/>



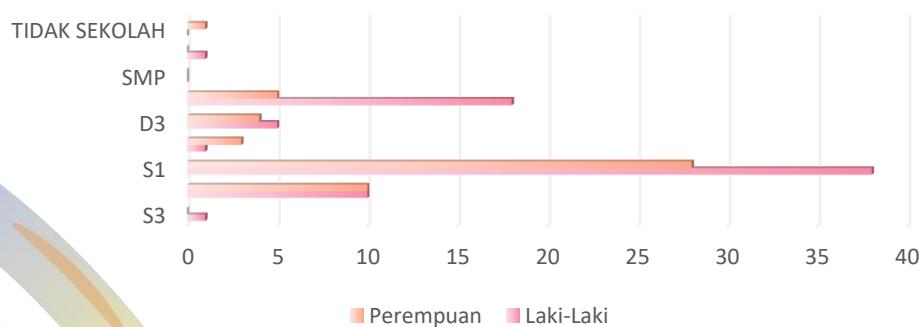
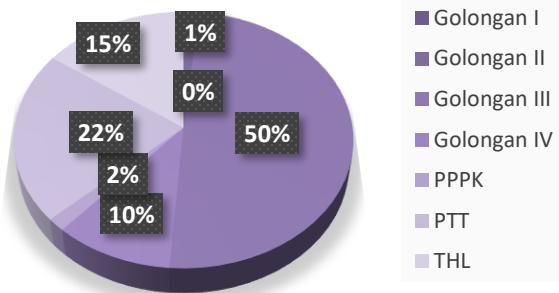
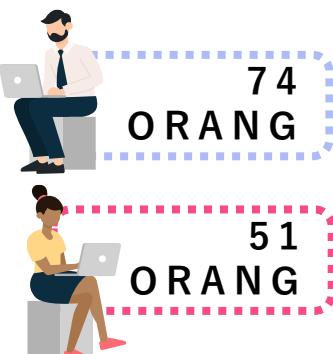
PROFIL KEPALA BADAN

Nama : Misni, S.K.M, M.Si

NIP : 19730516 199903 2 007

Pangkat/ Golongan : IV/d Pembina Utama Madya

SUMBER DAYA MANUSIA



CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



SASARAN 1

PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH YANG BERKUALITAS

INDEKS PERENCANAAN



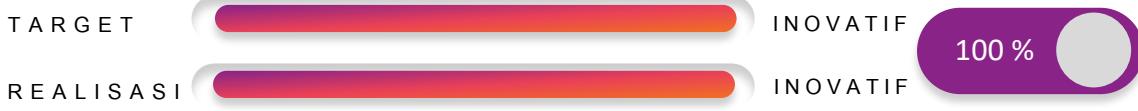
SASARAN 2

TERWUJUDNYA RUMUSAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DARI HASIL RISET DAN INOVASI DAERAH

PERSENTASE HASIL RISET YANG DIREKOMENDASIKAN



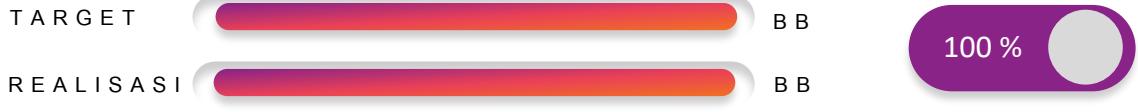
INDEKS INOVASI DAERAH



SASARAN 3

MENINGKATNYA KUALITAS DAN EFEKTIVITAS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

NILAI SAKIP BAPPEDA



INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT



REALISASI ANGGARAN

Rp. 33.576.963.459,00





PENGHARGAAN DAN PRESTASI



GURINDAM AWARD

Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau meraih Penghargaan Gurindam Award Bank Indonesia Kepulauan Riau Tahun 2024 kategori Stakeholder Kontributor Terbaik dalam Sinergi Kajian Perekonomian Provinsi Kepulauan Riau. Gurindam Award Bank Indonesia Kepulauan Riau Tahun 2024 merupakan apresiasi Bank Indonesia Kepulauan Riau kepada Mitra strategis atas dedikasi dan kolaborasi aktif bersama Bank Indonesia Kepulauan Riau.

PENGHARGAAN PEMBANGUNAN DAERAH (PPD) TAHUN 2024

Provinsi Kepulauan Riau mendapatkan dinobatkan sebagai 12 besar Provinsi dengan Kategori Perencanaan dan Pencapaian Daerah tingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Penghargaan Pembangunan Daerah 2024 yang dilaksanakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas





The background features a large, light purple diagonal shape with a dotted pattern. Three stylized human figures are positioned on a grey oval. The figure on the left holds a red puzzle piece above their head. The middle figure holds a yellow puzzle piece. The figure on the right holds a blue puzzle piece. To the right of the figures, there are large, overlapping shapes in shades of orange, red, and purple.

BAB I

PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) utama yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, memiliki peranan yang sangat penting dan strategis dalam merancang strategi pembangunan di masa depan dalam rangka menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di Provinsi Kepulauan Riau.

Sebagai entitas utama pelaksanaan perencanaan pembangunan, Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau dituntut untuk dapat menghadirkan proses perencanaan yang inklusif, transparan dan akuntabel yang ditunjukan melalui performa kinerja guna terciptanya *good governance and clean government* (tata penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan baik) dengan pilar transparansi, partisipatif dan akuntabilitas pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Selanjutnya, pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk penerapan sistem pertanggungjawaban yang jelas, teratur, dan efektif yang disebut dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau disingkat dengan SAKIP tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menjelaskan SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasi, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya.

MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2024 dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan.

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan (Pemerintah Pusat, DPRD dan masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumberdaya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

LKjIP merupakan suatu bentuk format pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian dan hambatan

pelaksanaan rencana kerja. Secara umum LKjIP ini bertujuan untuk:

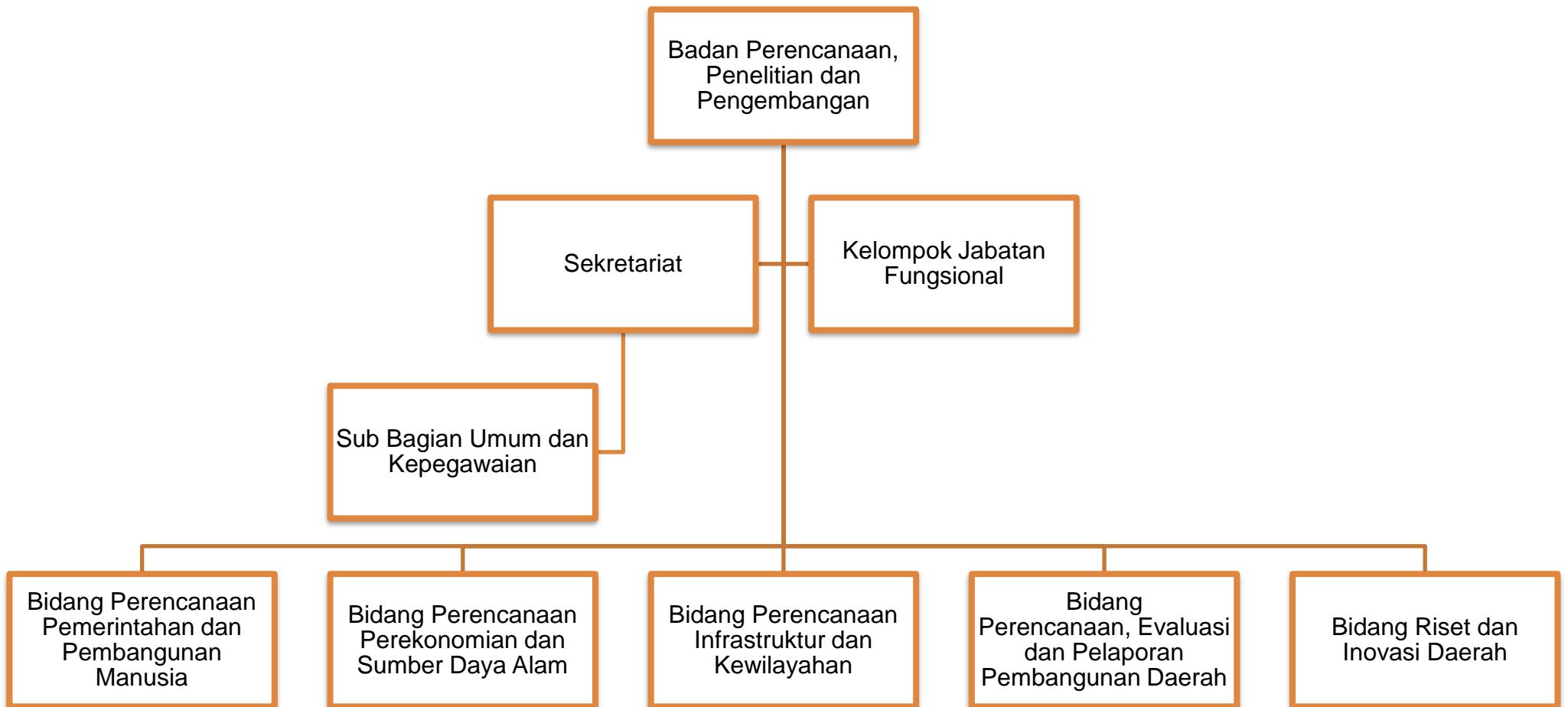
1. Mendorong instansi pemerintah untuk mencapai *Good Governance*, karena LKjIP merupakan dasar untuk mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*Stakeholders*) dengan instansi pemerintah;
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.
4. Sebagai laporan pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan rencana strategis;
5. Tindak lanjut atau respon terhadap Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

TUGAS FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.



Untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, struktur organisasi Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau adalah sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Menurut Peraturan
Gubernur Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah

Uraian tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dan sekretariat adalah sebagai berikut.

Sekretariat

TUGAS

- Melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, anggaran, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, barang milik negara/daerah, arsip dan dokumentasi, serta membantu Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mengkoordinasikan bidang-bidang.

FUNGSI

- Penyusunan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan terkait perencanaan dan evaluasi, keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pengoordinasian pelaksanaan akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi lingkup perangkat daerah;
- Penyiapan bahan dan mengkoordinasikan perencanaan program kegiatan dan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang lingkup perangkat daerah;
- Penyiapan bahan perencanaan anggaran dan penyusunan dokumen anggaran lingkup perangkat daerah;
- Penyiapan dan menyusun bahan terkait ketatalaksanaan lingkup perangkat daerah;
- Penyiapan bahan Laporan bulanan, triwulan, semester, tahunan, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah lingkup perangkat daerah;
- Pelaksanaan implementasi akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi lingkup perangkat daerah;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi seluruh program kerja lingkup perangkat daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan;
- Pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban keuangan;
- Penyiapan bahan pelaporan keuangan perangkat daerah;
- Penyusunan dan penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah;
- Penyusunan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah.

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian

TUGAS

- Melakukan pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga, perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara melakukann pengelolaan administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, rumah tangga, perlengkapan, dan evaluasi kinerja Aparatur Sipil Negara

FUNGSI

- Pelaksanaan pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan, dan pengadministrasian umum;
- Pelaksanaan dan menyiapkan pengelolaan ketatausahaan, kehumasan, rumah tangga dan aset;
- Pelaksanaan dan menyiapkan kebutuhan pengelolaan administrasi kepegawaian, dan pengembangan pegawai;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur;
- Pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan aset/kekayaan milik daerah di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan mulai dari rencana kebutuhan, pengadaan, penomoran inventaris, penyimpanan, penggunaan, perawatan serta inventaris ruangan;
- Penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana;
- Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabaran, informasi faktor jabatan dan standar kompetensi jabatan terhadap seluruh jabatan;
- Penyusunan job description seluruh jabatan di lingkungan unit organisasi; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

TUGAS

- Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

FUNGSI

- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan

Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

TUGAS

- Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam

FUNGSI

- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

TUGAS

- Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan

FUNGSI

- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan daerah meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan;
- Pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah

- lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahahan;
- Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahahan;
- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahahan;
- Pengoordinasian pelaksanaan sinkronisasi dan fasilitasi perencanaan pembangunan daerah antar sektor, antar wilayah, antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahahan;
- Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahahan;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahahan;
- Pelaksanaan pengendalian, monitoring dan evaluasi terhadap dokumen perencanaan perangkat daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota lingkup Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahahan; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah

TUGAS

- Memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan Pembangunan

FUNGSI

- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan Pembangunan;
- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan Pembangunan;

- Pelaksanaan penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah, termasuk juga kebijakan keuangan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi pagu indikatif perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi muatan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan laporan capaian pelaksanaan pembangunan daerah tahun berjalan, serta merekomendasikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan pembangunan daerah Provinsi;
- Pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, evaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah kabupaten/kota, serta merekomendasikan hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Kabupaten/Kota;
- Pelaksanaan penyelarasan muatan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota;
- Penyusunan dan pelaksanaan pelaporan pembangunan daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
- Pelaksanaan koordinasi pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan Daerah sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- Pelaksanaan koordinasi dan pemanfaatan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi, dan konsultasi terkait dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang Riset dan Inovasi Daerah

TUGAS

- memimpin, mengkoordinasikan, merumuskan dan menyusun bahan kebijakan terkait Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi serta melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan

- berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

FUNGSI

- Penyusunan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, Ekonomi dan Pembangunan, Inovasi dan Teknologi;
- Pelaksanaan koordinasi fasilitasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi sinergitas dan harmonisasi kegiatan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan data pembangunan daerah di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan teknis dan hubungan kerja dengan instansi dan unit kerja terkait;
- Pelaksanaan koordinasi penyusunan perencanaan program dan anggaran di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- Pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi Perangkat Daerah di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- Pelaksanaan bimbingan teknis, supervisi dan konsultasi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di daerah;
- Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan serta koordinasi sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- Pelaksanaan koordinasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;

- Penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan kebijakan, serta inovasi dan invensi di Bidang Riset dan Inovasi Daerah;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Riset dan Inovasi Daerah; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Kelompok Jabatan Fungsional

TUGAS DAN FUNGSI

- Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan tugas sesuai dengan keahlian yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

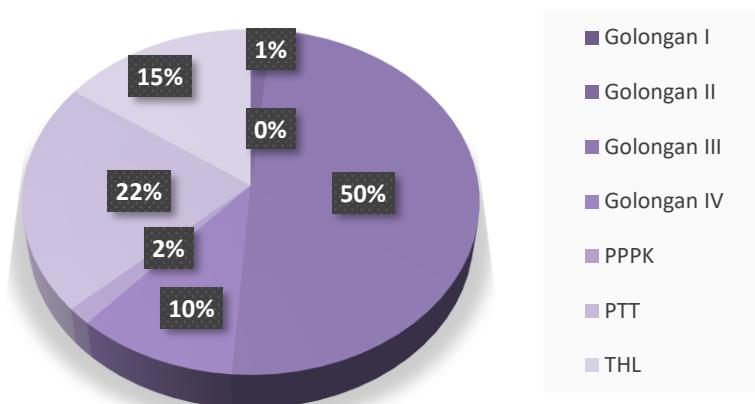
SUMBERDAYA MANUSIA

Jumlah aparatur berdasarkan data dari Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Tahun 2024 (per Desember) berjumlah 125 orang, yang terdiri dari ASN dan non-ASN. Dari sisi golongan, mayoritas pegawai berada pada Golongan III (62 orang) dan Golongan IV (13 orang), sementara Golongan I tidak memiliki pegawai sama sekali. Selain itu, terdapat 2 orang PPPK, 27 PTT, dan 19 THL. Komposisi ini menunjukkan bahwa mayoritas pegawai berada pada level menengah hingga tinggi dalam struktur ASN, dengan dukungan tenaga non-ASN yang cukup signifikan. Secara rinci dapat dijelaskan pada table dan diagram sebagai berikut:

**Tabel 1.1
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang dan Non ASN
Per Desember Tahun 2024**

No	Golongan	Jumlah
1.	Golongan I	0
2.	Golongan II	2
3.	Golongan III	62
4.	Golongan IV	13

No	Golongan	Jumlah
5.	PPPK	2
6.	PTT	27
7.	THL	19
Jumlah		125



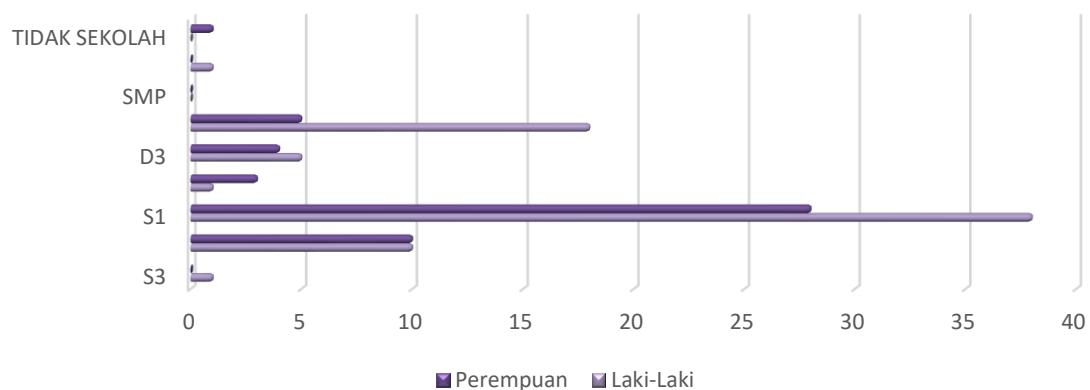
**Gambar 1.2
Diagram Persentase Perbandingan Jumlah ASN Berdasarkan Golongan Ruang dan Non ASN Per Desember Tahun 2024**

Jika dilihat dari tingkat pendidikan, mayoritas pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana (S1) sebanyak 66 orang, diikuti oleh S2 sebanyak 20 orang. Pegawai dengan pendidikan SMA juga cukup banyak, mencapai 23 orang, sementara tingkat pendidikan tertinggi (S3) hanya dimiliki oleh 1 orang. Ini menunjukkan bahwa organisasi ini memiliki sumber daya manusia yang relatif terdidik, terutama dalam perencanaan dan penelitian. Sementara itu, dari segi jabatan, jumlah terbesar adalah pelaksana (28 orang) dan non-ASN (47 orang), yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai bertugas dalam operasional dan administrasi. Namun, jumlah pejabat struktural dan fungsional yang menangani kebijakan serta perencanaan juga cukup banyak, dengan beberapa posisi strategis seperti Perencana, Analis Kebijakan, dan Peneliti Ahli. Komposisi ini menunjukkan keseimbangan antara peran perencanaan, kebijakan, dan dukungan administrasi

dalam organisasi. Secara rinci dapat dijelaskan pada table dan diagram sebagai berikut:

Tabel 1.2
Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Jenjang Pendidikan Terakhir	Tahun 2024		
		Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	S3	1	-	1
2.	S2	10	10	20
3.	S1	38	28	66
4.	D4	1	3	4
5.	D3	5	4	9
6.	SMA	18	5	23
7.	SMP	-	-	-
8.	SD	1	-	1
9.	Tidak Sekolah	-	1	1
Jumlah		74	51	125

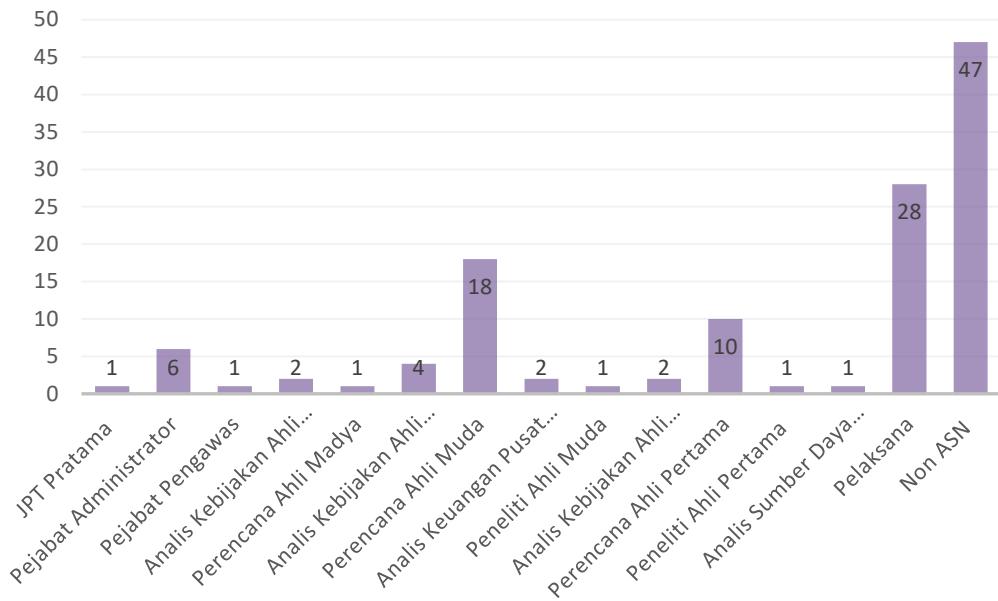


Gambar 1.3
Perbandingan Jumlah ASN dan Non ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Tabel 1.3
Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan
di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Jabatan	Jumlah
1.	JPT Pratama	1
2.	Pejabat Administrator	6
3.	Pejabat Pengawas	1
4.	Analisis Kebijakan Ahli Utama	2
5.	Perencana Ahli Madya	1
6.	Analisis Kebijakan Ahli Muda	4
7.	Perencana Ahli Muda	18
8.	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	2
9.	Peneliti Ahli Muda	1
10.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	2
11.	Perencana Ahli Pertama	10
12.	Peneliti Ahli Pertama	1
13.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	1
14.	Pelaksana	28
15.	Non ASN	47
	TOTAL	125





Gambar 1.3
Diagram Jumlah ASN Berdasarkan Jabatan
di Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

SARANA DAN PRASARANA

Sejalan dengan tugas dan fungsinya, disamping sumber daya manusia, perlengkapan juga menjadi syarat mutlak dalam menunjang, mendorong serta memfasilitasi kinerja serta dalam mekanisme pencapaian target kinerja pembangunan daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Ditinjau dari dukungan sarana prasarana sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan, didukung beberapa sarana prasarana sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1.4
Jumlah Sarana dan Prasarana Menurut Kondisi Badan Perencanaan,
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No.	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah Barang	Total Nilai Perolehan
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN						
1.	Mini Komputer	-	-	1	1	14,500,000.00
2.	P.C Unit	52	-	-	52	624,649,076.00
3.	Lap Top	114	-	-	114	1,817,296,782.00
4.	Note Book	23	-	-	23	347,085,639.00

No.	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah Barang	Total Nilai Perolehan
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
5.	Tablet PC	24	-	-	24	352,171,000.00
6.	Hard Disk	17	-	-	17	25,307,950.00
7.	CPU (Peralatan Mini Komputer)	-	-	1	1	13,250,000.00
8.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	102	-	-	102	326,248,550.00
9.	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2	-	2	4	22,563,300.00
10.	Peralatan Personal Komputer lainnya(loudspeker)	-	1	-	1	1,290,000.00
11.	Alat Tenis Meja	-	-	2	2	12,000,000.00
12.	Station Wagon	18	-	-	18	4,429,530,670.00
13.	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	1	-	-	1	225,900,000.00
14.	Pick Up	1	-	-	1	159,830,000.00
15.	Sepeda Motor	17	-	-	17	315,428,000.00
16.	Mesin Ketik Listrik	2	-	-	2	14,927,500.00
17.	Mesin Absen (Time Recorder)	2	-	-	2	9,300,000.00
18.	Mesin Penghitung Uang	3	-	-	3	17,980,000.00
19.	Lemari Besi/Metal	1	-	-	1	88,700,000.00
20.	Lemari Kayu	30	-	-	30	575,597,987.00
21.	Filing Cabinet Besi	23	-	-	23	76,000,000.00
22.	Brandkas	2	-	-	2	16,950,000.00
23.	Lemari Kaca	2	-	-	2	8,500,000.00
24.	CCTV - Camera Control Television System	5	-	-	5	19,190,000.00
25.	White Board	-	-	1	1	27,700,000.00
26.	Alat Penghancur Kertas	20	-	-	20	96,173,200.00
27.	Focusing Screen/Layar LCD Projector	12	-	-	12	73,115,000.00
28.	Alat Kantor Lainnya	-	-	5	5	104,900,000.00
29.	Meja Kerja Kayu	119	-	-	119	677,401,320.00
30.	Meja Rapat	12	-	-	12	84,200,000.00
31.	Meja 1/2 Biro	6	-	-	6	14,460,000.00
32.	Kursi Rapat	81	-	-	81	194,729,000.00
33.	Kursi Putar	123	-	-	123	216,336,100.00
34.	Partisi	10	-	-	10	1,034,478,200.00
35.	Sofa	9	-	-	9	77,900,000.00
36.	Lemari Es	11	-	-	11	25,520,000.00
37.	A.C. Split	38	-	-	38	299,654,028.00
38.	Alat Pendingin lainnya	3	-	-	3	14,994,000.00
39.	Treng Air/Tandon Air	3	-	-	3	14,465,000.00
40.	Televisi	26	-	-	26	447,685,100.00
41.	Mic Conference	29	-	-	29	233,430,000.00
42.	Unit Power Supply	14	-	-	14	45,831,000.00
43.	Camera Video	6	-	-	6	108,400,000.00
44.	Tustel	14	-	-	14	155,064,300.00
45.	Tangga Aluminium	1	-	-	1	6,099,500.00
46.	Dispenser	5	-	-	5	12,945,000.00
47.	Coffee Maker	1	-	-	1	3,500,000.00
48.	Handy Cam	1	1	1	3	30,910,000.00
49.	Alat Rumah Tangga Lain-lain	-	-	42	42	187,600,250.00
50.	Alat Pemadam/Portable	17	-	-	17	22,610,000.00
51.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	6	-	-	6	10,980,000.00
52.	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	-	-	2	14,251,000.00
53.	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5	-	-	5	12,480,000.00
54.	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	15	-	-	15	35,696,300.00
55.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	6	-	-	6	11,814,000.00
56.	Kursi Kerja Pejabat lainnya	6	2	-	8	17,672,000.00

No.	Nama / Jenis Barang	Kondisi			Jumlah Barang	Total Nilai Perolehan
		Baik	Kurang Baik	Rusak Berat		
57.	Microphone/Wireless MIC	1	-	-	1	7,000,000.00
58.	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	-	-	1	1	1,318,000.00
59.	peralatan studio audio lainnya (dst)	2	-	1	3	63,639,000.00
60.	Camera Electronic	1	-	-	1	25,712,000.00
61.	Teleprompter	1	-	-	1	2,200,000.00
62.	Tripod Camera	1	-	-	1	1,600,000.00
63.	Lensa Kamera	3	-	-	3	45,570,000.00
64.	Layar Film/Projector	-	-	1	1	19,700,000.00
65.	peralatan pemancar shf lainnya (dst)	2	-	-	2	9,880,000.00
66.	Alat Kedokteran umum lainnya	2	-	-	2	3,600,000.00
67.	Tripod	2	-	-	2	6,990,000.00
68.	Thermometer Digital Portable	3	-	-	3	3,600,000.00
Total		1.153	4	58	1.215	14,310,422,804.50

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap permasalahan yang melekat pada tugas dan fungsi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Belum optimalnya kualitas dan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan perangkat daerah, serta kualitas dokumen perencanaan pembangunan multi sektor dalam rangka penanganan isu strategis pembangunan daerah.
 - Belum terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 - Belum optimalnya implemetasi konsep Tematik, Holistik, Intergratif, dan Spasial (THIS) dalam kebijakan pembangunan daerah pada dokumen perencanaan pembangunan daerah.
 - Belum optimalnya penerapan pendekatan-pendekatan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

- Masih kurangnya peran hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.
2. Belum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan Daerah dengan Pemerintah Pusat.
- Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat perbedaan visi dan kebijakan yang tidak selaras, sehingga sulit untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan yang dikembangkan oleh satu pihak terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Pemerintah Daerah;
 - Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat menyebabkan tindakan yang tidak terkoordinasi dan efisien. Ini dapat memperlambat pelaksanaan pembangunan.
3. Belum optimalnya implementasi rencana kelitbang dan pemanfaatan hasil kelitbang, serta inovasi dalam mendukung pembangunan daerah
- Belum optimalnya pengelolaan hasil kelitbang dan fasilitasi pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG
 - Belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.

TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

Telaah terhadap visi, misi dan program prioritas Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah untuk lima tahun yang akan datang dan juga untuk mengidentifikasi keterkaitannya dengan faktor-faktor pendukung (penghambat dan pendorong) pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut.

Sebagaimana tertuang dalam dokumen Perubahan RPJMD tahun 2021-2026, Visi dan Misi Pembangunan Kepulauan Riau yang akan dicapai selama periode 5 (lima) tahun mendatang yaitu:

1. Visi

Visi Provinsi Kepulauan Riau periode 2021-2026 adalah:
”Terwujudnya Kepulauan Riau yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- Makmur: Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.
- Berdaya Saing: Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- Berbudaya: Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara.

2. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

- Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat
- Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan
- Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Takwa
- Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
- Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau mengarah pada pencapaian misi RPJMD yaitu berada pada misi ke-2 yaitu: "Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan"

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-2 tersebut adalah: Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif, dengan sasaran, yaitu Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan.

Faktor pendorong dan faktor penghambat yang dihadapi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam pencapaian visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Terpilih tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 1.5
Permasalahan, Faktor Penghambat dan Pendorong Layanan Pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
Misi 2: Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Belum terwujudnya konsistensi antara prioritas pembangunan daerah dengan pagu anggaran dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Belum optimalnya implementasi konsep Tematik, Holistik, Intergratif, dan Spasial (THIS) dalam kebijakan pembangunan daerah pada dokumen perencanaan 	<ol style="list-style-type: none"> Belum optimalnya kapasitas SDM perencana dan peneliti dalam mempelajari perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perencanaan, pelaporan kinerja, penganggaran dan evaluasi perencanaan pembangunan, serta kelitbangkaan dan inovasi daerah. 	<ol style="list-style-type: none"> Regulasi Tentang Sistem Pembangunan Nasional Regulasi Tentang Pemerintahan Daerah Regulasi Tentang SPM Regulasi Tentang SDGs dan Perencanaan Sektoral Regulasi Tentang IKU Dan IKK Regulasi Tentang

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>pembangunan daerah.</p> <p>3. Belum optimalnya penerapan pendekatan-pendekatan perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.</p> <p>4. Masih kurangnya peran hasil pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah.</p> <p>5. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah terdapat perbedaan visi dan kebijakan yang tidak selaras, sehingga sulit untuk mencapai tujuan bersama. Kebijakan yang dikembangkan oleh satu pihak terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di Pemerintah Daerah;</p> <p>6. Kurangnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dapat</p>	<p>2. Belum optimalnya dukungan dan ketersediaan data, baik dari instansi vertikal maupun dari OPD Provinsi, dalam memenuhi kebutuhan perencanaan pembangunan daerah,</p> <p>3. Belum optimalnya upaya-upaya otomatisasi kerja berbasis internet (<i>IOT/Internet of Thing</i>) bidang perencanaan pembangunan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan pemanfaatan data dan informasi.</p> <p>4. Belum optimalnya Koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat</p> <p>5. Belum terintegrasinya pengelolaan sistem kelitbangaan dan</p>	<p>Pelaporan Dan Evaluasi Kinerja Pemerintahan Daerah</p> <p>7. Regulasi Tentang Tata Ruang Dan KLHS</p> <p>8. Kebijakan Permendagri 90 Tahun 2019 Jo Kepmendagri 0503708 Tahun 2020</p> <p>9. Regulasi Tentang Reformasi Birokrasi</p> <p>10. Regulasi Tentang Inovasi Daerah</p> <p>11. Regulasi Tentang Kelitbangaan</p> <p>12. Kebijakan Satu Data Indonesia</p> <p>13.</p>

Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD	Permasalahan Pelayanan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Faktor	
		Penghambat	Pendorong
	<p>menyebabkan tindakan yang tidak terkoordinasi dan efisien. Ini dapat memperlambat pelaksanaan pembangunan;</p> <p>7. Belum optimalnya pengelolaan hasil kelitbangam dan fasilitasi pengembangan inovasi umum dan inovasi perangkat daerah, dan pengembangan TTG.</p> <p>8. Belum optimalnya hasil kerjasama penelitian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan.</p>	<p>inovasi daerah dalam mendukung pembangunan daerah.</p> <p>6. Masih kurangnya jumlah pegawai fungsional terutama analis kebijakan dan fungsional peneliti guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan.</p> <p>7. Belum optimalnya koordinasi, sosialisasi dan diseminasi hasil kelitbangam dan inovasi daerah pada perangkat daerah.</p> <p>8. Rendahnya kuantitas dan kapasitas SDM bidang penelitian dan pengembangan dalam pengembangan kreatifitas dan penggunaan teknologi tepat guna.</p>	

PENENTUAN ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Berkaitan dengan peran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terutama dalam memberikan pelayanan di bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan, Isu-isu yang perlu mendapat perhatian diidentifikasi sebagai berikut:

1. Optimalisasi Pengelolaan Kesekretariatan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian dan pengembangan yang efisien dan efektif.
1. Optimalisasi kompetensi ASN dan peningkatan kapasitas ASN dalam memaksimalkan kinerja birokrasi dan penyelenggaraan urusan penunjang pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan bidang penelitian.
2. Optimalisasi Penyelarasan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota, Nasional dan Daerah Sekitar.
3. Peningkatan Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah, Tahunan dan Dokumen Perencanaan Sektoral serta Rencana Aksi/Rencana Induk dan sejenisnya.
4. Optimalisasi Dukungan Penelitian dan Pengembangan dalam Penentuan Kebijakan Pembangunan Daerah yang inovatif dan berdaya saing.





BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, menyebutkan bahwa perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis yang setidaknya memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, kebutuhan anggaran serta target pencapaiannya.

Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau yang ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 merupakan manifestasi komitmen Barenlitbang Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung

visi dan misi Pemerintah Gubernur dan Wakil Gubernur yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026.

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Memperhatikan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026, telah ditetapkan visi, yaitu **"Terwujudnya Kepulauan Riau yang**

Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya”

Visi Provinsi Kepulauan Riau tersebut selanjutnya dapat dimaknai sebagai berikut:

- **Makmur:** Kehidupan masyarakat Kepulauan Riau yang layak, sehat, dan sejahtera.
- **Berdaya Saing:** Terwujudnya masyarakat, birokrasi pemerintahan dan dunia usaha yang mampu bersaing dan unggul di tingkat regional dan internasional.
- **Berbudaya:** Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan aktivitas masyarakat Kepulauan Riau yang berpegang pada nilai-nilai agama, budaya Melayu dan budaya Nusantara

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka ditetapkan 5 misi pembangunan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 - 2026, yaitu:

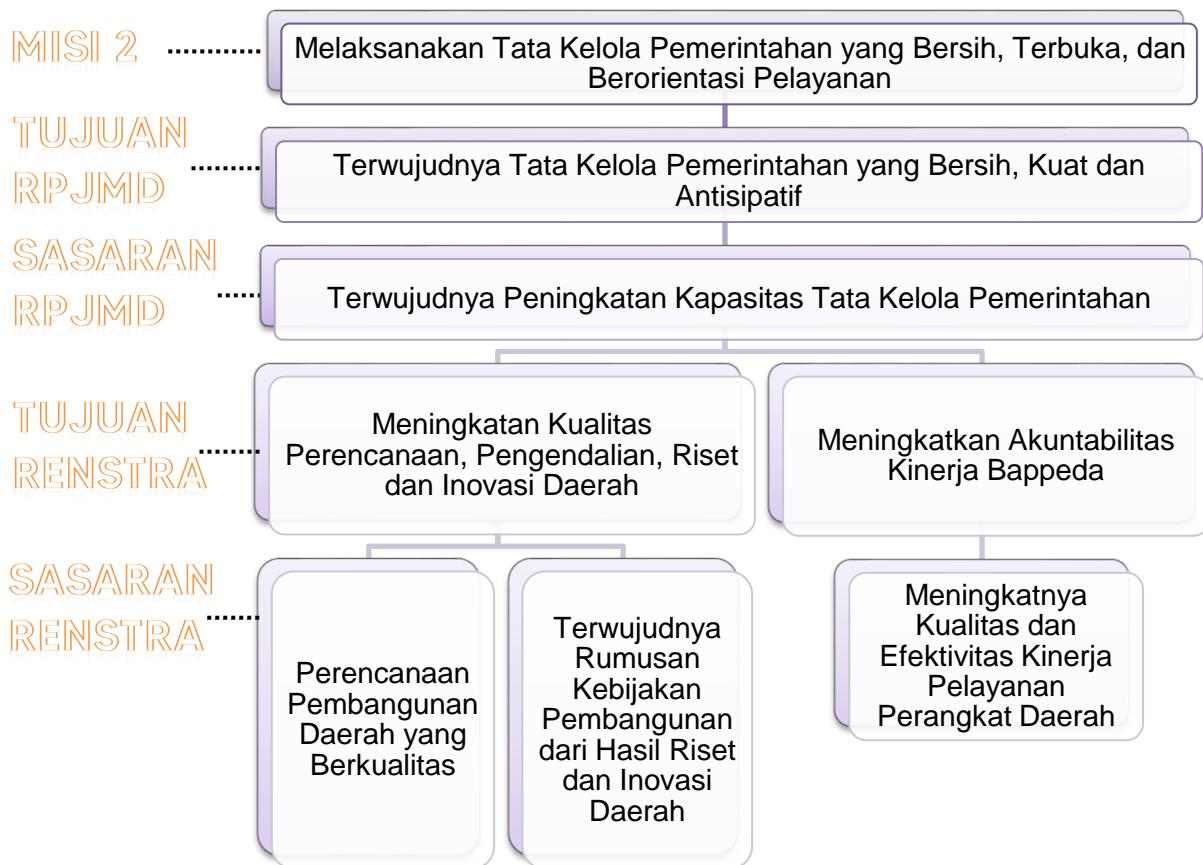
- 1) Percepatan Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Maritim, Berwawasan Lingkungan dan Keunggulan Wilayah Untuk Peningkatan Kemakmuran Masyarakat

- 2) Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan
- 3) Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas, Sehat, dan Berdaya Saing dengan Berbasiskan Iman dan Takwa
- 4) Mengembangkan dan Melestarikan Budaya Melayu dan Nasional Dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
- 5) Mempercepat Konektivitas Antar Pulau dan Pembangunan Infrastruktur Kawasan

Dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan sebagai perangkat daerah yang menangani perencanaan daerah memiliki peran dalam mewujudkan misi ke-2 yaitu: **“Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Terbuka, dan Berorientasi Pelayanan”**

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari misi ke-2 tersebut adalah: Tata Kelola Pemerintahan Yang Bersih, Kuat, dan Antisipatif, dengan sasaran, yaitu Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan.

Keterkaitan Visi Misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Badan Perencanaan Penlitian dan Pengembangan secara lengkap dituangkan dalam Cascade sebagai berikut :



Gambar 2.1
Cascading Misi, Tujuan RPJMD, Sasaran RPJMD, Tujuan Renstra dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan Penlitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, misi, tujuan, serta sasaran maka disusun indikator kinerja dalam kurun waktu 2021-2026 tiap tahunnya yang meliputi:

- I. Tujuan I : Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Riset dan Inovasi Daerah
- Indikator : Nilai Sakip dari aspek perencanaan dan Pengukuran Kinerja
1. Sasaran 1 : Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas
 - : Indeks Perencanaan Pembangunan
 2. Sasaran 2 : Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah
- Indikator : Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan
 - : Indeks Inovasi Daerah
- II. Tujuan II : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda
- Indikator : Rata-Rata Capaian IKU Bappeda
3. Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- Indikator : Nilai SAKIP Bappeda
 - : IKM Bappeda

Selanjutnya Tujuan, Sasaran Strategis, indikator kinerja beserta target kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan berdasarkan keterkaitannya dengan misi pembangunan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Renstra Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2021-2026

Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja			Kondisi Akhir
				2024	2025	2026	
Tujuan I Meningkatkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai Sakip dari aspek perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Skor	44,58	47	49	51	
Sasaran I.1 Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik
Sasaran I.2 Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan	Na	%	100	100	100	100
Tujuan II Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Rata-Rata Capaian IKU Bappeda	%	116,20	90	92	94	94
Sasaran II.1 Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai SAKIP	BB	BB	A	A	A
	IKM Bappeda	Skor	84,81	90	91	92	92

PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah,

bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja disusun dengan memperhatikan Dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2021-2026, Dokumen Rencana Kinerja Tahun 2024 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024. Adapun target kinerja Badan Perencanaan, Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2
Target Kinerja Tahun 2024
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Baik
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan	100
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappeda	BB
		IKM Bappeda	90

Untuk mendukung ketercapaian target yang telah ditetapkan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan mengelola anggaran sebesar Rp. 33.576.963.459,00 yang digunakan untuk melaksanakan 4 (empat) Program, 16 (enam belas) Kegiatan dan 52 (lima puluh dua) Sub Kegiatan. keterkaitan antara perencanaan kinerja dan anggaran dengan target yang ditetapkan, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Sasaran, Indikator, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan serta Target Kinerja dan Anggaran Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah/ Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome)/Kegiatan (output)/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Renja PD Tahun Berjalan (n) 2024	
Tujuan 1: Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Pengendalian, Riset dan Inovasi Daerah	Nilai Sakip dari Aspek Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Skor	51	
Sasaran 1.1 Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Indeks	Baik	
PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	%	90	3.741.181.127
	Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD	%	90	
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pendanaan Yang Disusun	Dokumen	24	2.974.022.856
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	15	83.691.750
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	Berita Acara	1	72.323.175

Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Berita Acara	1	204.366.174
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	Berita Acara	2	578.229.389
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	Dokumen	5	2.035.412.368
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	1	22.298.883
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dokumen	1	22.298.883
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Dokumen	28	744.859.388
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	5	318.663.405
Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	Dokumen	28	426.195.983
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	Persen	90	1.851.430.389
	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Persen	90	

	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahannya	Persen	90	
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Dokumen	1	509.015.750
	Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Laporan	5	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	130.664.501
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Laporan	1	25.654.690
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Laporan	1	31.047.300
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	70.217.159
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	137.789.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Laporan	1	113.643.100

Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Dokumen	1	552.296.939
	Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Laporan	1	
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan	1	379.903.814
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	172.393.125
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Infrastruktur Bidang dan Kewilayahan	Dokumen	1	790.117.700
	Jumlah Perencanaan Infrastruktur Bidang dan Kewilayahan	Laporan	3	
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dokumen	1	136.422.800
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	112.715.100
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Laporan	1	145.438.400
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Laporan	1	395.541.400

Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan	Persen	100	
	Indeks Inovasi Daerah	Kategori Indeks	Inovatif	
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan.	Persen	100	743.490.996
Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Dokumen	3	551.080.096
Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Laporan	1	160.217.150
Fasilitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Laporan	1	215.169.981
Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbang dan Peraturan yang Dikelola	Dokumen	1	175.692.965
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Laporan	1	192.410.900
Diseminasi Jenis Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Laporan	1	192.410.900
Tujuan 2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Rata-Rata Capaian IKU Bappeda	Persentase	94	
Sasaran 2.1: Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Bappeda	Nilai SAKIP	A	
	IKM Bappeda	Skor	92	

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Persen	100	27.240.860.947
Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja OPD	Persen	100	162.583.333
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	3	106.369.473
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2	19.496.159
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja	Laporan	5	36.717.701
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	100	20.869.688.130
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/Bln	90	20.136.151.530
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	1	614.772.000
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1	33.026.200
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen	1	38.733.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	1	27.803.600
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1	19.201.800

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	Persen	100	726.000
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	1	726.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persen	100	32.164.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	20	32.164.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	100	1.666.640.378
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	58.993.725
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	99.994.905
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	249.994.023
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	233.551.770
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	Dokumen	1	85.360.000
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	1	227.015.955
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1	711.730.000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	100	76.203.848
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	150	76.203.848
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	2.941.051.284
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	1	12.550.000

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	82.890.000
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan Perlengkapan yang Disediakan	Laporan	1	236.400.000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	1	2.609.211.284
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	100	1.491.803.974
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	8	78.757.900
Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	30	396.329.650
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	1.076	49.621.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	1	967.095.424

Adapun Perjanjian Kinerja (PK) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	93,67
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangsaan	85
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	45
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 27.348.756.087,00	APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evauasi Pembangunan Daerah	Rp. 4.436.075.905,00	APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.566.331.650,00	APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 994.485.800,00	APBD

Selanjutnya dengan telah disahkannya Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2021-2026 serta Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, **sehingga perlu dilakukan** revisi/perubahan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam lampiran I point E pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PermenPAN dan RB) Nomor 53 Tahun 2014.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka telah disusun Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun Anggaran 2024 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Baik
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	100 %
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	90

	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 27.240.860.946,75	P-APBD
2.	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.741.181.127,01	P-APBD
3.	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.851.430.388,81	P-APBD
4.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 743.490.996,43	P-APBD



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau merupakan upaya untuk mengukur tingkat capaian kinerja kegiatan yang dimulai dengan menetapkan indikator kinerja kegiatan dan digunakan sebagai dasar untuk menilai suatu pelaksanaan program dan kegiatan yang sesuai dengan sasaran serta tujuan yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

Pengukuran kinerja mencakup seluruh kinerja sasaran berdasarkan dokumen penetapan kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 yang ditargetkan untuk dicapai menggunakan rumus berikut:

Rumus Capaian

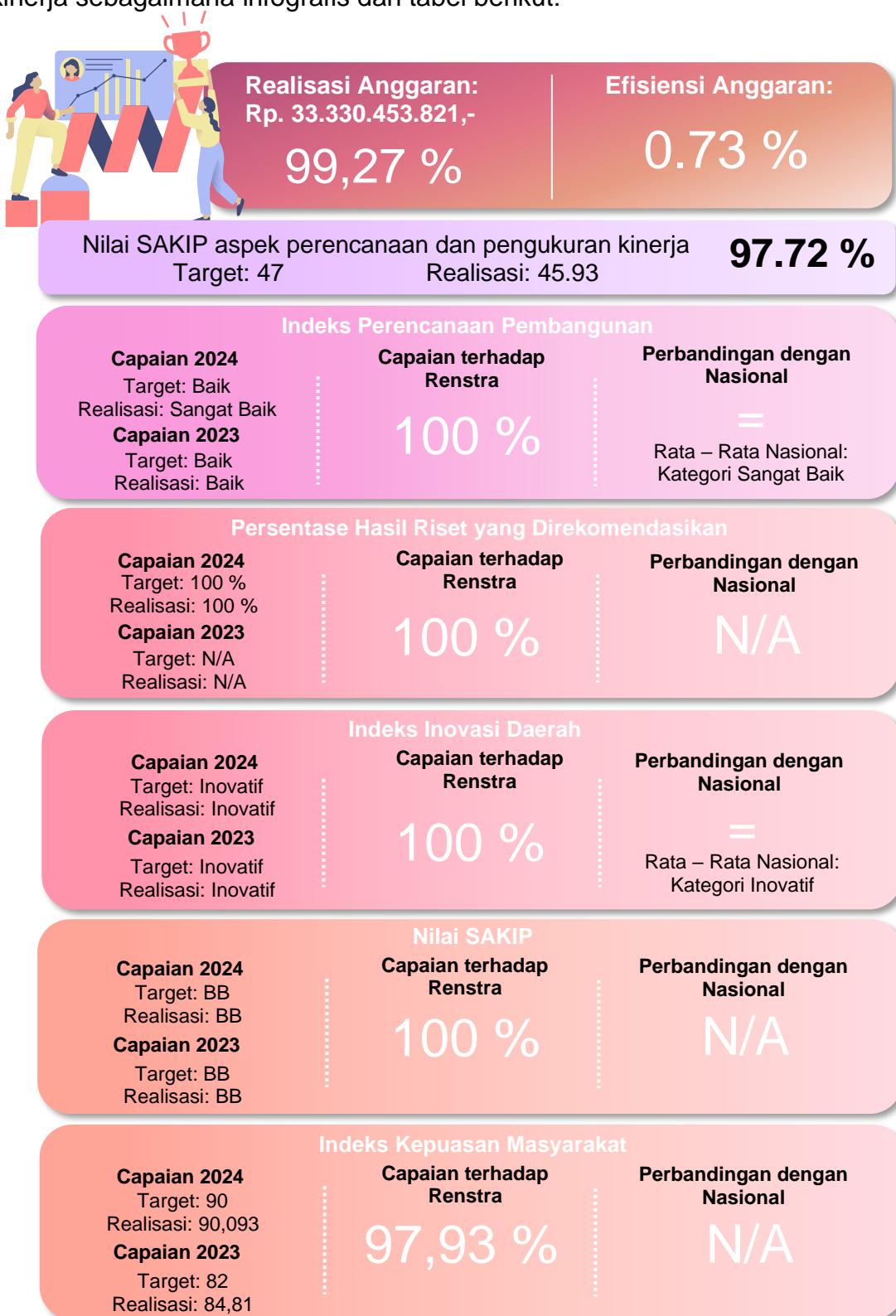
$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \left(\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \right) \times 100 \%$$

Gambar 3.1
Rumus Capaian Kinerja

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Capaian Kinerja (CK) Serta Hasil dan Penjelasan

TABEL SKALA PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA (CK) SERTA HASIL DAN PENJELASAN		
Skala Capaian Kinerja (%)	Hasil Capaian Indikator Kinerja	Penjelasan Skala Capaian Kinerja
CK>75	Sangat Berhasil	Capaian Kinerja Lebih besar dari 75%
50<CK<75	Berhasil	Capaian Kinerja diatas 50% sampai dengan Kurang dari 75%
25<CK<50	Cukup Berhasil	Capaian Kinerja diatas 25 % sampai dengan Kurang dari 50%
0<CK<25	Tidak Berhasil	Capaian Kinerja kurang dari 25%

Capaian kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 selanjutnya dilihat dari ketercapaian indikator kinerja sebagaimana infografis dan tabel berikut:



Gambar 3.2
Capaian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Tahun 2024

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi	Baik (81,00–90,99)	Sangat Baik (91,24)	100,27 %
Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan	100 %	100 %	100 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Bappeda	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	
	Nilai SAKIP	BB	BB	100 %
	IKM Bappeda	90	90,093	100,10 %

Perencanaan Kinerja di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau telah berorientasi hasil melalui peningkatan aspek kualitas dan kebermanfaatannya. Hal ini terlihat dari capaian masing-masing indikator yang secara terperinci dijelaskan sebagai berikut:





**Sasaran:
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas**

INDEKS PERENCANAAN

1

Selaras dengan RPJMN 2020-2024 dimana Reformasi Birokrasi ditetapkan sebagai pengarusutamaan yang wajib dilakukan oleh seluruh Kementerian/Lembaga/Daerah, maka setiap Kementerian/Lembaga *leading* sektor harus memastikan pelaksanaan program sesuai dengan kegiatan/tema yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, guna mendukung sasaran program “Menguatnya manajemen kinerja dalam sistem pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel”.

Sejalan dengan hal tersebut, dalam menjalankan peran, tugas dan fungsinya maka Kementerian PPN/Bappenas telah melaksanakan langkah-langkah penguatan dan reform baik secara internal maupun eksternal guna meningkatkan kinerja khususnya untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publik di bidang perencanaan pembangunan yaitu salah satunya dengan mensinkronkan perencanaan pembangunan berdasarkan pendekatan *money follow program* dan dilakukan secara tematis, holistik, integratif dan spasial (THIS). Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan *tools* yang digunakan untuk memastikan terwujudnya sinkronisasi tersebut. Fokus utama dalam penilaian Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Pemerintah Provinsi adalah mengukur kualitas hasil perencanaan yang dilakukan oleh masing-masing Pemerintah Provinsi. Terdapat beberapa aspek penilaian yang dijadikan sebagai dasar untuk mengukur kualitas hasil perencanaan dalam IPPN Pemerintah Provinsi tersebut, yang meliputi:

1) Sinergi

Aspek Sinergi ditujukan untuk mengukur kerjasama yang harmonis antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka mencapai sasaran Prioritas Nasional. Keterpaduan perencanaan pusat dan daerah khususnya dukungan/kontribusi pembangunan daerah terhadap pencapaian sasaran Prioritas Nasional. Keterpaduan diukur atas:

- Keselarasan Dokumen RPJMD dengan Dokumen RPJMN.
- Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP.
- Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk Membayai Program Prioritas Nasional/*Major Project* dalam Dokumen RKPD

2) Kualitas Perencanaan

Perencanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, perlu dilakukan juga penilaian terhadap hasil akhir dari kualitas perencanaan yang dilihat dari bagaimana kesesuaian dari tiap-tiap bagiannya. Sub Komponen dari penilaian terhadap kualitas perencanaan di daerah, diukur berdasarkan:

- Kesesuaian antara Isu Strategis – Target – Program/Kegiatan/Proyek di RPJMD atau RKPD.
- Inovasi Perencanaan Pembangunan.

3) Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja

Aspek keterhubungan perencanaan pembangunan dengan perencanaan kinerja berkaitan dengan bagaimana penyusunan kinerja di Pemerintah Provinsi telah disesuaikan substansinya dengan rencana pembangunan nasional. Sehingga, nantinya apa yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dapat secara langsung berhubungan dengan usaha pencapaian pembangunan secara nasional dan tidak hanya untuk pencapaian institusinya saja.





Gambar 3.3
Hierarki IPPN Pemerintah Provinsi

aspek yang dinilai pada Pemerintah Provinsi terdiri dari aspek Sinergi, Kualitas Perencanaan, serta Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja. Ketiga aspek tersebut dirinci menjadi indikator dan sub-indikator yang masing-masing diberi bobot penilaian. Tabel berikut menjelaskan terkait aspek dan indikator yang dinilai pada Pemerintah Provinsi, bobot penilaian, serta dokumen yang dinilai.

Tabel 3.3
Rangkuman Kertas Kerja Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi

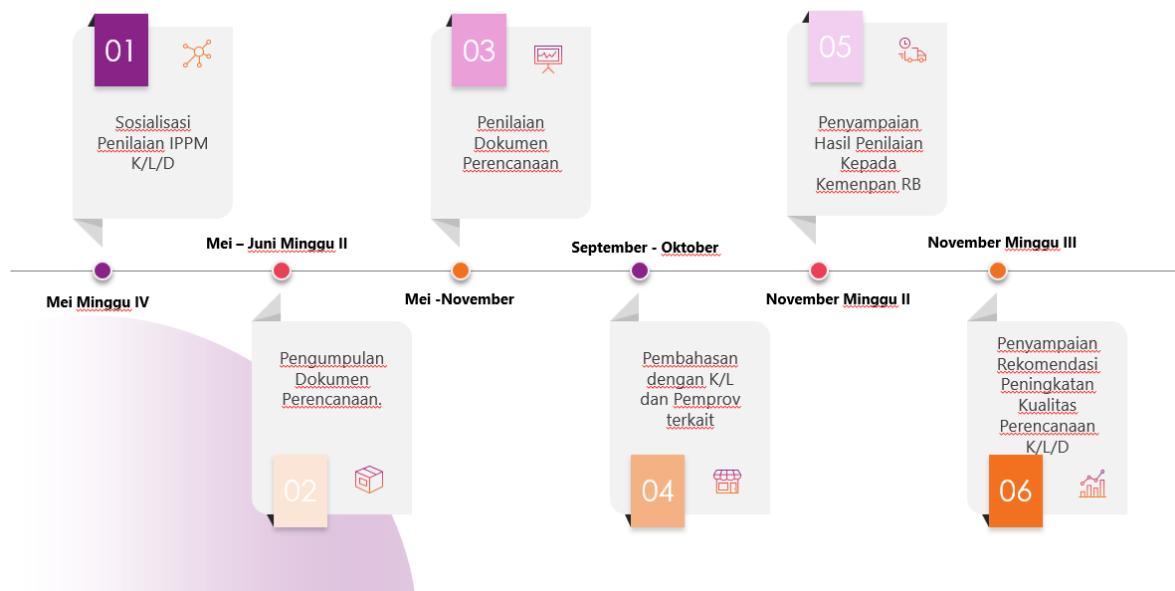
No	Aspek	Bobot	Indikator	Bobot	Sumber Data
1	Sinergi	32	Keselarasan Dokumen RPJMD dengan	9	RPJMN-RPJMD
			Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	13	Modul PPD dan RKP – RKPD
			Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk Membayai Program Prioritas Nasional/Major	10	RKP – RKPD
2	Kualitas Perencanaan	58	Kesesuaian antara Isu Strategis – Target - Program/Kegiatan/Proy	49	Modul PPD dan RPJMD / RKPD
3	Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan	10	Target dan Sasaran Pembangunan Daerah Menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait	10	RKPD – Renstra / Renja OPD

Hasil akhir penilaian IPPN Pemerintah Provinsi secara keseluruhan tersebut selanjutnya akan diberi predikat dengan mengacu pada kriteria predikat sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2023. Pemeringkatan predikat tersebut dikelompokkan menjadi 5 (lima) predikat yang dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 3.4
Kriteria Predikat Kualitas Perencanaan Berdasarkan Hasil Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi

Rentang Nilai	Predikat
91,00 – 100,00	Sangat Baik
81,00 – 90,99	Baik
71,00 – 80,99	Cukup Baik
61,00 – 70,99	Kurang
≤	Sangat Kurang

Proses penilaian IPPN dilakukan dengan beberapa tahapan yang dapat sebagaimana terlihat pada diagram berikut



Gambar 3.4
Tahapan Penilaian IPPN tahun 2024

Penjelasan mengenai masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

a. Penyampaian Dokumen oleh Masing-masing Instansi

Tahapan penyampaian dokumen pada penilaian IPPN Provinsi tahun 2024 telah dilakukan mulai minggu IV bulan Mei sampai dengan Minggu II bulan Juni Tahun 2024. Dokumen yang disampaikan kepada Kementerian PPN/Bappenas adalah seluruh Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Riau

b. Pengecekan Kelengkapan Dokumen

Sebelum dimulai penilaian, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan pengecekan terhadap dokumen-dokumen yang sudah dikirimkan. Apabila terdapat kekurangan, maka akan dilakukan permohonan penyampaian kembali atas dokumen-dokumen terkait.

c. Penilaian Dokumen Perencanaan

Setelah periode pengumpulan dokumen terkait, mulai dilakukan penilaian atas dokumen perencanaan oleh Kementerian PPN/Bappenas sebagaimana instrumen kertas kerja yang sudah disusun tersebut. Instansi yang dinilai tidak perlu melakukan penilaian mandiri. Desk Pembahasan Penilaian IPPN Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan pada hari Rabu 16 Oktober 2024. Hadir pada saat pembahasan, Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau. Pada desk pembahasan tersebut, dilakukan verifikasi atas dokumen dan kertas kerja yang telah disampaikan serta bukti dukung lainnya.



Gambar 3.5
Kepala Bappeda Provinsi Kepulauan Riau dalam Desk Penilaian IPPN Tahun 2024

d. Penyampaian Hasil Penilaian

Setelah dokumen perencanaan selesai dilakukan penilaian, Kementerian PPN/ Bappenas akan menyampaikan hasil penilaian tersebut kepada instansi terkait serta kepada Kementerian PAN RB sebagai salah satu komponen penilaian untuk indeks Reformasi Birokrasi (RB).

e. Pemberian Rekomendasi Peningkatan Kualitas Perencanaan

Setelah penilaian telah selesai dilakukan, maka akan diketahui komponen apa saja yang telah memiliki skor penuh atau kurang maksimal. Rekomendasi yang akan diberikan disesuaikan sebagaimana skor atas komponen-komponen penilaian tersebut.

f. Diseminasi Rekomendasi Optimalisasi Dokumen Perencanaan

Pada tahapan ini, Kementerian PPN/Bappenas akan melakukan diseminasi kepada seluruh instansi terkait mengenai rekomendasi untuk meningkatkan kualitas dari dokumen perencanaan. Tahapan ini akan dilakukan dalam bentuk forum penyampaian hasil serta dalam bentuk surat untuk penyampaian rekomendasi secara spesifik kepada instansi terkait.

Adapun hasil penilaian atas Dokumen Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.5
Hasil Penilaian Aspek Ketersediaan Dokumen/Data untuk Pemerintah Provinsi

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Ketersediaan Dokumen	
			Dokumen 1	Dokumen 2
1. Sinergi	1.a	1.a.1	RPJMN 2020-2024 (Tersedia)	RPJMD 2021-2026 (Tersedia)
		1.a.2	RPJMN 2020-2024 (Tersedia)	RPJMD 2021-2026 (Tersedia)
		1.a.3	RPJMN 2020-2024 (Tersedia)	RPJMD 2021-2026 (Tersedia)
		1.a.4	RPJMN 2020-2024 (Tersedia)	RPJMD 2021-2026 (Tersedia)
		1.a.5	RPJMN 2020-2024 (Tersedia)	RKPD 2024 (Tersedia)
		1.a.6	RPJMN 2020-2024 (Tersedia)	RKPD 2024 (Tersedia)
	1.b.1		PPD 2024 (Tersedia)	

	1.b	1.b.2	PPD 2024 (Tersedia)	
		1.b.3	PPD 2024 (Tersedia)	
		1.b.4	PPD 2024 (Tersedia)	
		1.b.5	PPD 2024 (Tersedia)	
		1.b.6	PPD 2024 (Tersedia)	
		1.b.7	PPD 2024 (Tersedia)	
		1.b.8	RKP 2024 (Tersedia)	RKPD 2024 (Tersedia)
		1.c	1.c.1	RKP 2024 (Tersedia)
2. Kualitas Perencanaan	2.a	2.a.1 (a dan b)	PPD 2024 (Tersedia)	
		2.a.1 (c)	RKPD 2024 (Tersedia)	RKPD 2024 (Tersedia)
		2.a.2	RKPD 2024 (Tersedia)	RKPD 2024 (Tersedia)
		2.a.3	RKPD 2024 (Tersedia)	RKPD 2024 (Tersedia)
3.Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	2.b	2.b.1	PPD 2024 (Tersedia)	
		2.b.2	PPD 2024 (Tersedia)	
3.Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a	3.a.1	RKPD 2024 (Tersedia)	Renstra OPD (Ada Semua)

Tabel 3.6
Rekap Hasil Penilaian IPPN Pemerintah Provinsi

Nama Provinsi : Kepulauan Riau

Total Nilai : 91,24

Predikat : Sangat Baik

Aspek	Indikator	Sub-Indikator	Sub-Sub-Indikator	Bobot Maksimum	Rata-Rata Keselarasan Terbobot
1. Sinergi	1.a Keselarasan Dokumen RPJMD dengan	1.a.1 Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan	1.a.1.a Tingkat Keterkaitan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah RPJMD dengan PN RPJMN	0,50	0,24

	Dokumen RPJMN	Sasaran Prioritas Nasional (PN) RPJMN	1.a.1.b Tersedianya Tabel Persandingan antara Sasaran Pembangunan daerah RPJMD dengan PN RPJMN	0,50	0,00
			1.a.1.c Tingkat Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD dengan PN RPJMN	0,50	0,50
			1.a.1.d Tersedianya Tabel Persandingan antara PN RPJMN dengan Prioritas Pembangunan Daerah	0,50	0,50
		1.a.2 Tersedianya Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam RPJMN	1.a.2.a Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 1 (Penguatan Ekonomi dan Pertumbuhan Berkualitas) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43
			1.a.2.b Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 2 (Pengembangan dan Pemerataan Wilayah) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43
			1.a.2.c Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 3 (Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43

			1.a.2.d Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 4 (Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43
			1.a.2.e Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 5 (Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43
			1.a.2.f Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 6 (Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43
			1.a.2.g Ketersediaan Dukungan Program Daerah dalam RPJMD untuk Mendukung Kegiatan Prioritas dalam PN 7 (Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik) RPJMN Sesuai Kewenangan Daerah	0,43	0,43
		1.a.3 Indikator Makro pada RPJMD Selaras dengan Indikator Makro pada RPJMN	1.a.3.a Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	0,50	0,15
			1.a.3.b Tingkat Kemiskinan (%)	0,50	0,34

		1.a.4 Dokumen RPJMD Selaras dengan Proyek Prioritas Strategis	-	1,00	0,91
		1.a.5 Komponen SPM di RPJMD Diselaraskan dengan Komponen SPM Nasional	-	1,00	1,00
		1.a.6 Target SPM Daerah Diselaraskan dengan Target SPM Nasional	-	1,00	1,00
	1.b Keselarasan Dokumen RKPD dengan RKP	1.b.1 Keselarasan antara Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD dengan Sasaran Prioritas Nasional (PN) RKP Berkualitas RKP	-	2,50	2,25
		1.b.3 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 2: Pengembangan dan Pemerataan Wilayah RKP	-	1,50	1,05
		1.b.4 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 3: Peningkatan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing RKP	-	1,50	1,20
		1.b.5 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 4: Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan RKP	-	1,50	0,60

		1.b.6 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 5: Penguatan Infrastruktur dan Pelayanan Dasar RKP	-	1,50	0,90
		1.b.7 Tersedianya Dukungan Program Daerah RKPD terhadap Kegiatan Prioritas pada PN 6: Lingkungan Hidup, Ketahanan Bencana Perubahan Iklim RKP	-	1,50	0,75
		1.b.8 Indikator Makro pada RKPD Selaras dengan Indikator Makro pada RKP	1.b.8.a Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	0,75	0,65
			1.b.8.b Tingkat Kemiskinan (%)	0,75	0,39
	1.c Kesesuaian Anggaran Daerah (APBD) untuk Membayai Program Prioritas Nasional / Major Project dalam Dokumen RKPD	1.c.1 Tersedianya Dukungan APBD untuk Program Prioritas Nasional/ Major Project dalam Dokumen RKPD	-	10,00	10,00
2. Kualitas Perencanaan	2.a Kesesuaian antara Isu Strategis – Target–Program / Kegiatan /Proyek di RPJMD atau RKPD	2.a.1 Kesesuaian Isu Strategis dengan Kebutuhan Daerah	2.a.1.a Keterkaitan Permasalahan daerah (Kebutuhan Daerah) dengan Hasil Evaluasi	6,00	5,76
			2.a.1.b Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan	6,00	5,20

			2.a.1.c Penyusunan Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Isu Strategis	6,00	6,00
		2.a.2 Kesesuaian Target dan Sasaran Pembangunan dalam menyelesaikan Isu dan Prioritas Daerah	2.a.2.a Tersedianya Indikator Sasaran untuk Isu Strategis/Prioritas Pembangunan Daerah	6,00	6,00
			2.a.2.b Tingkat Kesesuaian Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dalam Menyelesaikan Isu Strategis Daerah/Prioritas Pembangunan Daerah	8,00	8,00
		2.a.3 Kesesuaian Program/Kegiatan/Proyek dalam Mencapai Target dan Sasaran Program	2.a.3.a Prioritas Pembangunan Daerah Dijabarkan Menjadi Program Prioritas	8,50	8,50
			2.a.3.b Tingkat Keterkaitan Indikator Sasaran Prioritas Pembangunan Daerah dengan Indikator Kinerja Program Prioritas	8,50	8,50
	2.b Inovasi Perencanaan Pembangunan	2.b.1 Keterkaitan Permasalahan dengan Inovasi yang Dilaksanakan	-	4,50	3,81
		2.b. 2 Keterkaitan Output dengan Outcome Inovasi	-	4,50	2,83
3.Keterhubungan Perencanaan Pembangunan dengan Perencanaan Kinerja	3.a Target dan Sasaran Pembangunan daerah Menjadi Target dan Sasaran Kinerja Lembaga terkait	3.a.1 Cascading Target Pembangunan Daerah menjadi Target Kinerja Lembaga Terkait di dalam Pemerintah Daerah	3.a.1.a Tersedianya Penanggungjawab OPD untuk Masing-masing Program Prioritas	5,00	5,00
			3.a.1.b Target dan Sasaran Prioritas Daerah Menjadi IKU OPD yang Bertanggungjawab	5,00	5,00



CAPAIAN KINERJA

Tabel 3.7

Capaian Kinerja Indeks Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi	Baik (81,00–90,99)	Sangat Baik (91,24)	100,27 %

Berdasarkan tabel diatas, adapun hasil penilaian IPPN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 mendapat total nilai sebesar **91,24** atau kategori **Sangat Baik**, capaian ini lebih tinggi dari yang ditargetkan yaitu pada kategori baik (81 – 90,99). Tahun 2024 merupakan tahun ke 2 sejak dilaksanakannya penilaian IPPN oleh Kementerian PPN/Bappenas dan tahun pertama sejak ditetapkannya Perubahan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sandingan realisasi dan capaian kinerja antar periode dan terhadap target akhir renstra merupakan salah satu tolok ukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2024 terhadap capaian kinerja tahun 2023 serta perbandingan dengan target akhir renstra adalah sebagai berikut

Tabel 3.8

Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dan Tahun 2023

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Deviasi	Keterangan
	Tahun 2023	Tahun 2024		
Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi	83, 82 (Kategori Baik)	91, 24 (Kategori Sangat Baik)	7,24	Meningkat

Tabel 3.9
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau
Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi	Sangat Baik (91, 24)	Baik (81,00 – 90,99)	100,27 %

Dari kedua tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja IPPN Provinsi kepulauan Riau Tahun 2024 mengalami peningkatan dari periode sebelumnya serta telah melebihi target yang ditetapkan pada target akhir periode Renstra 2021-2026. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau sudah cukup baik. Adapun perbandingan capaian IPPN Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan capaian rata rata nasional disajikan pada tabel berikut

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja IPPN Provinsi Kepulauan Riau dengan Rata-Rata Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Rata-Rata Nasional	Keterangan
Indeks Perencanaan Pembangunan (IPPN) Provinsi	Sangat Baik	Sangat Baik	Sama Dengan

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Keberhasilan capaian kinerja indikator sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Provinsi Kepulauan Riau tidak lepas dari komitmen seluruh *stakeholder* untuk menghasilkan dokumen Dokumen Perencanaan 2024 yang berkualitas andal dan kredibel serta selaras/sejalan dengan perencanaan dan penganggaran Pusat. beberapa faktor lain sebagai yang mendukung keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Komunikasi yang aktif dengan Pemerintah Pusat dalam upaya memastikan keselarasan dan keterpaduan perencanaan pembangunan antara Provinsi Kepulauan Riau dengan Pusat khususnya dukungan/kontribusi pembangunan Provinsi Kepulauan Riau terhadap Prioritas Nasional.



Gambar 3.6
Dokumentasi Badan Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau dalam Forum – Forum Koordinasi Bersama Pemerintah Pusat

2. Pendampingan/ asistensi yang intensif oleh Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah agar sasaran, arah kebijakan, isu strategis, program, kegiatan, dan sub kegiatan selaras dengan RKPD 2024, RPJMD 2021-2026 dan kebijakannya.





Gambar 3.7
Dokumentasi Badan Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau dalam Forum – Forum Koordinasi Bersama Perangkat Daerah



3. Adanya partisipasi dari berbagai pihak/stakeholder dalam proses perencanaan untuk memperkaya masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan.

Gambar 3.8
Dokumentasi Badan Perencanaan Provinsi Kepulauan Riau dalam Pelaksanaan Musrenbang Provinsi

4. Terdapat cascading kinerja yang memastikan seluruh indikator kinerja telah diampu oleh perangkat daerah penanggungjawab

FAKTOR PENGHAMBAT

Untuk beberapa subkomponen pada penilaian IPPN yang masih mendapat hasil penilaian kurang memuaskan antara lain disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

1. Perbedaan target khususnya indikator makro antara pemerintah pusat dan daerah. Optimisme target nasional yang cukup tinggi menjadi kendala di daerah karena karakteristik di daerah yang beragam.
2. Belum optimalnya pemanfaatan dan keterkaitan *outcome* inovasi dalam perencanaan pembangunan
3. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kegiatan prioritas nasional

UPAYA PERBAIKAN

Dalam rangka upaya perbaikan, rencana aksi tahun selanjutnya yang akan dilakukan yaitu:

1. Memastikan dokumen perencanaan disusun dan disajikan dengan lebih komprehensif.
2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi intensif dengan mitra perangkat daerah, Kementerian PPN/Bappenas dalam rangka penyelarasan Renja Perangkat daerah dengan RKPD, RKPD dengan RKP, RPJMD dan RPJMN.
3. Meningkatkan implementasi inovasi dalam perencanaan pembangunan untuk mempercepat dan menjawab isu permasalahan di Daerah.
4. Intensifikasi pengendalian, pemantauan dan evaluasi berkala agar dapat membuat rumusan mitigasi risiko yang ada.



PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Upaya untuk mencapai target kinerja indikator sasaran Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2024 dilaksanakan melalui 2 Program, 6 kegiatan dan 20 sub kegiatan yaitu:

- I. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
 1. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan
 - a. Sub Kegiatan Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
 - d. Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi
 2. Kegiatan Analisis data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi
 - b. Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota
- II. Program Koordinasi dan SInkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
 1. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD RPJMD dan RKPD)
 - b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan
 - d. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - e. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Pembangunan Manusia
2. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (SDA)
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD RPJMD dan RKPD)
 3. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD RPJMD dan RKPD)
 - b. Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur

- c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur
- d. Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur



Sasaran:

Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah

PERSENTRASE HASIL RISET YANG DIREKOMENDASIKAN INDEKS INOVASI DAERAH

Riset dan inovasi memiliki peran yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena keduanya menyediakan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Dengan data dan informasi yang akurat, pengambil kebijakan dapat merumuskan strategi yang relevan dan efektif. Riset juga membantu dalam mengidentifikasi masalah dan peluang, yang krusial untuk merancang program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, inovasi dalam perencanaan memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien, sehingga biaya dan waktu pelaksanaan proyek dapat diminimalkan.

Lebih jauh lagi, riset dan inovasi berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam menghadapi tantangan global, seperti perubahan iklim dan krisis ekonomi, riset dan inovasi memperkuat adaptasi dan ketahanan masyarakat. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat menjadi semakin penting, karena riset mendorong sinergi yang dapat memperkuat kapasitas dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Provinsi Kepulauan Riau memiliki komitmen yang kuat terhadap pelaksanaan riset daerah. Hal ini dilakukan dalam rangka penguatan

research-based policy dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Berbagai riset telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dalam rangka menjawab berbagai permasalahan daerah sehingga dapat menghasilkan keputusan yang lebih tepat. Untuk itu, salah satu indikator kinerja yang diampu oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan adalah persentase hasil riset yang direkomendasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Indikator ini dihitung berdasarkan formulasi jumlah hasil Riset yang direkomendasikan masuk kedalam RKPD dibagi jumlah Riset yang dilakukan dikali 100 yang bersumber dari hasil riset yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan atau Perangkat Daerah lain atau dari hasil riset yang dipublikasikan pada Jurnal *Archipelago*.

Menurut Pasal 386 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Inovasi diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Lebih lanjut, menurut

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah disebutkan bahwa Tujuan pelaksanaan Inovasi Daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan Sasaran Inovasi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Dalam ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah diatas, Inovasi Daerah memiliki 3 (tiga) bentuk, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah: merupakan inovasi dalam pelaksanaan manajemen Pemerintahan Daerah yang meliputi tata laksana internal dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan unsur manajemen. Contohnya adalah *e-planning*, *e-budgeting*, dan lain-lain.
2. Inovasi Pelayanan Publik: merupakan inovasi dalam penyediaan layanan kepada masyarakat yang meliputi proses

pemberian layanan barang/jasa publik. Contohnya adalah inovasi pelayanan perizinan, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perpustakaan, pelayanan pembayaran pajak, dan lain-lain.

3. Inovasi Daerah Lainnya: merupakan segala bentuk inovasi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Contohnya Inovasi dalam Urusan Bidang Pekerjaan Umum dan lain-lain.

Sebuah inovasi dapat diakui sebagai Inovasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut: pertama, mengandung pembaharuan baik sebagian atau seluruhnya; kedua, memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; ketiga, merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; keempat, tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak seusai dengan ketentuan perundangan, serta yang terakhir adalah dapat direplikasi. Jika dilihat dari tipenya, Inovasi dapat berupa Inovasi Produk, Inovasi Proses, Inovasi Marketing, serta

Inovasi Organisasi. Sebuah Inovasi dapat diusulkan oleh beberapa pihak, diantaranya adalah Kepala Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Aparatur Sipil Negara (ASN), Perangkat Daerah, serta Anggota Masyarakat.

Inovasi Daerah diinput oleh pemerintah Daerah di seluruh Indonesia dalam suatu aplikasi (Indeks Inovasi Daerah) yang dijadikan pusat data Inovasi Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan pengkajian dan pengembangan Inovasi daerah sebagaimana amanat peraturan perundangan agar setiap Inovasi Daerah dilaporkan kepada Menteri baik tekait uji coba maupun penerapan Inovasi Daerah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui perkembangan inovasi di Daerah sehingga dapat menghasilkan Peta pembinaan sesuai karakteristik dan permasalahan di Daerah serta untuk berbagi pengalaman dan informasi tentang Inovasi bagi pemerintah Daerah dalam mengembangkan inovasi.

Adapun kriteria penilaian inovasi daerah adalah sebagai berikut:

1. Pembaharuan (*Novelty*)

2. Manfaat
3. Kepentingan Publik
4. Urusan Dan Kewenangan Pemda
5. Replikasi/Aplikatif

Lebih lanjut, kriteria penilaian ini dihitung menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$SPD = \sum_{i=1}^{15} \text{Skor Indikator ke}-i$$

$$SID = \frac{\sum_{j=1}^n (\sum_{i=1}^{35} \text{Skor Indikator ke}-i) \text{Inovasi Ke } j}{\text{MAX}(10,n)} + \text{Skor Jumlah Inovasi}$$

$$\text{Skor Total} = SPD + SID$$

$$IID = \frac{\text{Skor Total}}{\text{Skor Total Maksimum}} \times 100$$

Keterangan:

n adalah jumlah inovasi daerah

i adalah nomor indikator

j adalah nomor inovasi

SPD adalah Indikator Satuan Pemerintahan Daerah

SID adalah Indikator Satuan Inovasi Daerah

Gambar 3.9
Rumus Perhitungan Indeks Inovasi Daerah

Kategori capaian Indeks Inovasi Daerah yang ditetapkan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) adalah sebagai berikut:

1. Tidak Dapat Dinilai untuk Indeks Inovasi Daerah = 0
2. Kurang Inovatif untuk Indeks Inovasi Daerah 00,01 sampai dengan 34,99
3. Inovatif untuk Indeks Inovasi Daerah 35,00 sampai dengan 60,00
4. Sangat Inovatif untuk Indeks Inovasi Daerah 60,01 sampai dengan 100,00

CAPAIAN KINERJA



Hasil penilaian capaian kinerja pada urusan penelitian dan pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 untuk Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah (IKU PD) "Persentase Hasil Riset Yang di Rekomendasikan" mendapat total nilai sebesar 100 persen, persentase capaian ini sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Selanjutnya pada IKU PD "Indeks Inovasi Daerah" mendapatkan nilai

sebesar 50,33 (kategori Inovatif), capaian ini telah mencapai target yang telah ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.11
Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

Sasaran Strategis PD	IKU PD	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Terwujudnya rumusan kebijakan pembangunan dari hasil riset dan inovasi daerah	Persentase Hasil Riset Yang di Rekomendasikan	100%	100%	100%
	Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (35,00-60,00)	Inovatif (50,33)	100%

Tahun 2024 merupakan tahun pertama sejak ditetapkannya Perubahan Dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sandingan realisasi dan capaian kinerja antar periode dan terhadap target akhir renstra merupakan salah satu tolok ukur sebagai bahan evaluasi dan perbaikan kinerja ke depan. Adapun perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2023 terhadap capaian kinerja tahun 2024 serta perbandingan dengan target akhir renstra adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 dan Tahun 2024**

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja		Deviasi	Keterangan
	Tahun 2023	Tahun 2024		
Persentase Hasil Riset Yang di Rekomendasikan	n/a	100%	-	-

Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (43,83)	Inovatif (50,33)	6,49	Meningkat
-----------------------	---------------------	---------------------	------	-----------

Tabel 3.13
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024
dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Persentase Hasil Riset Yang di Rekomendasikan	100%	100%	100 %
Indeks Inovasi Daerah	Inovatif (50,33)	Inovatif (35,00-60,00)	100%

Dari kedua tabel diatas terlihat bahwa capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi kepulauan Riau Tahun 2024 khususnya untuk indikator Indeks Inovasi Daerah mengalami peningkatan dari periode sebelumnya, serta telah mencapai target yang sudah ditetapkan pada target akhir periode Renstra 2021-2026. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas urusan penelitian dan pengembangan di Provinsi Kepulauan Riau sudah lebih baik. Adapun perbandingan capaian kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan capaian rata rata nasional disajikan pada tabel berikut:



Tabel 3.14
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja
Urusan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
dengan Rata-Rata Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Rata-Rata Nasional	Keterangan
Persentase Hasil Riset Yang di Rekomendasikan	100%	n/a	n/a
Indeks Inovasi Daerah	Inovatif	Inovatif	Sama Dengan

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Keberhasilan capaian indikator kinerja urusan Penelitian dan Pengembangan “Persentase Hasil Riset Yang di Rekomendasikan” serta “Indeks Inovasi Daerah” di Provinsi Kepulauan Riau merupakan hasil kerja keras seluruh *stakeholder* untuk menghasilkan dokumen-dokumen kelitbangam 2024 yang berkualitas andal dan kredibel serta selaras/sejalan dengan kebijakan urusan penelitian dan pengembangan. Beberapa faktor lain sebagai yang mendukung keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kemudahan dalam mengakses data dan sumber informasi pendukung kelitbangam terutama data sektoral daerah melalui aplikasi e walidata
2. Koordinasi dan Komunikasi yang aktif dengan Perangkat Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota serta Pemerintah Pusat dalam upaya memastikan keselarasan dan keterpaduan urusan penelitian dan pengembangan
3. Adanya partisipasi dan kolaborasi yang baik dengan berbagai pihak/*stakeholder* dalam proses riset dan inovasi untuk memperkaya masukan dalam penyusunan dokumen perencanaan.
4. Asistensi mengoptimalkan dan mendorong pihak-pihak terkait untuk menghasilkan berbagai inovasi



Gambar 3.10
Dokumentasi Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Mendampingi Perangkat Daerah pada Optimalisasi Partisipasi dalam Kelitbang dan Inovasi

FAKTOR PENGHAMBAT

Dalam capaian urusan penelitian dan pengembangan, diakui masih mendapat hasil yang kurang memuaskan antara lain disebabkan oleh faktor sebagai berikut:

1. Pelaksanaan riset yang masih belum optimal karena belum dapat terlaksana secara konsisten setiap tahun. Hasil riset yang diperoleh saat ini masih bersumber dari hasil karya tulis ilmiah yang diterbitkan oleh Jurnal Archipelago milik Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.
2. Belum optimalnya pemanfaatan dan keterkaitan *outcome* inovasi daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan di daerah.
3. Keterbatasan kemampuan keuangan daerah dalam mendukung kegiatan riset dan inovasi.

4. Kapasitas SDM terkait dengan kemampuan mengoperasionalkan teknologi penerbitan jurnal dan *prociding* secara *online*, *website* serta *domain* yang masih memerlukan penyesuaian.

UPAYA PERBAIKAN

Dalam rangka upaya perbaikan, hal hal yang dapt dilakukan untuk memperkuat posisi sebagai salah satu provinsi paling inovatif di tingkat nasional yaitu:

1. Mendorong percepatan penerapan sistem pengelolaan data berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.
2. memperkuat kapasitas sumber daya manusia, terutama dalam pengembangan inovasi berbasis digital.
3. Peningkatan koordinasi lintas Perangkat melalui forum rutin juga dapat memastikan sinergi yang lebih baik dalam menciptakan dan mengintegrasikan inovasi.
4. pendampingan intensif bagi OPD yang menghadapi kendala dalam melengkapi data dukung inovasi.

PROGRAM KEGIATAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Adapun Program, Kegiatann dan Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian indikator Persentase Hasil Riset yang Direkomendasikan dan Indeks Inovasi Daerah antara lain:

- I. Program Penelitian dan Pengembangan
 1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
 - a. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi
 - b. Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan, dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah Reformasi Birokrasi
 - c. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan

2. Kegiatan Inovasi dan Teknologi
 - a. Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif



NILAI SAKIP BAPPEDA

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah suatu kerangka kerja yang dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kinerja instansi pemerintah di Indonesia. SAKIP mendorong setiap instansi untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program serta kegiatan mereka secara sistematis. Dengan adanya SAKIP, diharapkan instansi pemerintah dapat memberikan layanan publik yang lebih baik, mencapai tujuan pembangunan secara efektif, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Untuk itu, Nilai SAKIP menjadi salah satu indikator sasaran yang ingin dicapai oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.



Gambar 3.11
Siklus SAKIP

Tabel 3.15
Rentang Nilai SAKIP

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat Memuaskan. Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh Kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintahan yang dinamis, adaptif dan efisien (<i>reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu
2	A	>80 -90	Memuaskan. Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/ unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, berkinerja tinggi dan memuaskan, serta akuntabel pada seluruh unit kerja karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Sub Koordinator
3	BB	>70 - 80	Sangat Baik. Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kkerja pendukung. Akuntabilitas yang

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			sangat baik ditandai dengan Mukai terwujud efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telak dilakukan sampai ke level eselon 3/ koordinator
4	B	>60 - 70	Baik. Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai level eselon 2/ unit kerja
5	CC	>50 - 60	Cukup (Memadai). Terdapat gambaran bahwa akuntabilitas kinerja cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja
6	C	>30 - 50	Kurang. Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja kurang dapat

No	Kategori	Nilai Angka	Interpretasi
			diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat
7	D	0 - 30	Sangat Kurang. Sistem dan tatanan dalam akuntabilitas kinerja sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya mendadar khususnya dalam implementasi SAKIP



CAPAIAN KINERJA

Dari kriteria yang dijelaskan di atas, hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 adalah sebesar 79,70 yang menunjukkan kategori peringkat **BB (SANGAT BAIK)**. Nilai tersebut merupakan akumulasi dari penilaian dari komponen manajemen kinerja yang rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Hasil Penilaian Komponen SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	23,10
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,00
4	Akuntabilitas Kinerja	25,00	20,00
	Total	100,00	79,70

Adapun Capaian kinerja indikator sasaran Nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan adalah sebagai berikut

Tabel 3.17
Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

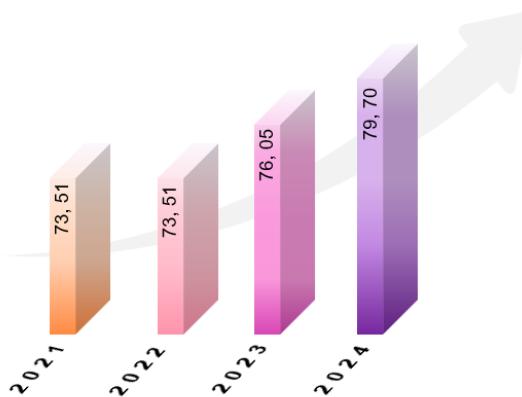
Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	BB (>70 – 80)	BB (79,70)	100%

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa pada tahun 2024 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau telah **BERHASIL** mencapai target sesuai dengan ditetapkan.



Tabel 3.18
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja				Keterangan
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Nilai SAKIP	BB (73,51)	BB (73,51)	BB (76,05)	BB (79,70)	Meningkat



Gambar 3.12
Grafik Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Tabel dan Grafik di atas, meskipun masih dalam rentang predikat BB namun secara total nilai menunjukkan adanya trend kenaikan nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dari tahun ke tahun. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan menetapkan target Nilai SAKIP dengan Predikat A pada periode akhir Renstra 2021-2026. Berkaitan dengan hal tersebut, masih perlu dilakukan upaya – upaya untuk meningkatkan kualitas implementasi SAKIP agar target yang telah ditetapkan dapat dicapai. Untuk perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir periode Renstra Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.19
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Nilai SAKIP	BB (79,70)	A (>80 - 90)	99 %

Tabel 3.20
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Nilai SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rata-Rata Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Rata-Rata Nasional	Keterangan
Nilai SAKIP	BB (79,70)	N/A	

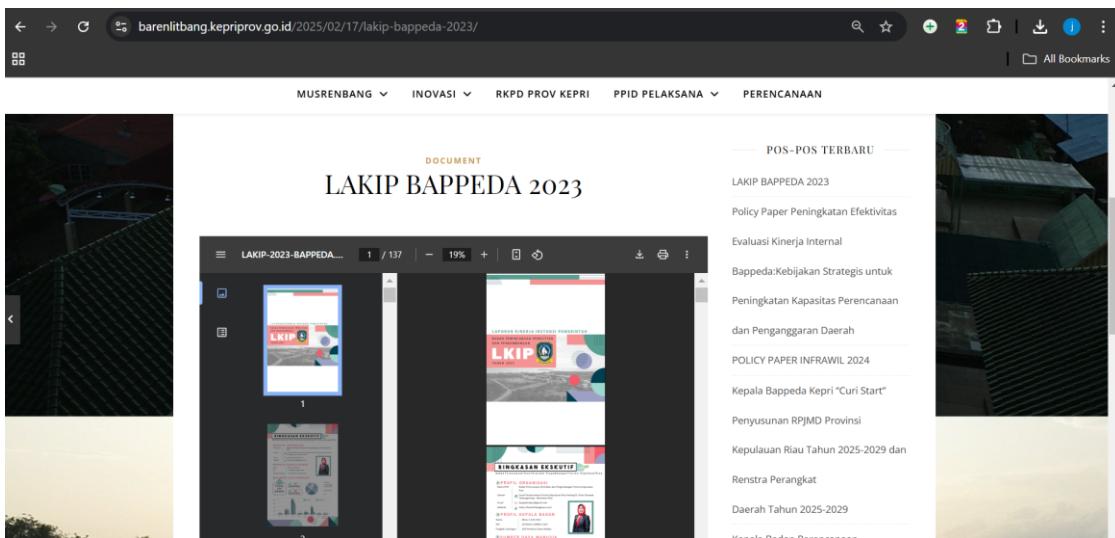
FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Dari pengukuran terhadap capaian kinerja indikator sasaran Nilai SAKIP, menunjukkan bahwa Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dikatakan **BERHASIL**. Keberhasilan ini didukung oleh beberapa faktor antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan yang Matang

Sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi Urusan Perencanaan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau senantiasa berupaya menyusun perencanaan yang baik, termasuk analisis situasi perumusan strategi yang efektif, dan identifikasi target yang realistik disertai indikator yang terukur.

2. Pelaporan yang Transparan. Penyampaian laporan kinerja yang akurat dan tepat waktu kepada publik dan pemangku kepentingan serta Penyusunan laporan yang mudah dipahami dan komprehensif.



Gambar 3.13
Publikasi Laporan Kinerja pada Website Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

3. Evaluasi Kinerja yang Berkesinambungan

Sistem *monitoring* dan evaluasi yang berkelanjutan untuk mengukur kemajuan, mengidentifikasi masalah, dan membuat penyesuaian saat diperlukan. Ini memungkinkan adaptasi terhadap perubahan situasi dan perbaikan kontinu dalam pencapaian kinerja. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan melaksanakan monitoring dan evaluasi atas capaian kinerja baik melalui desk evaluasi secara periodik



Gambar 3.14
**Desk Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**



4. Ketersediaan Sumber Daya yang Memadai. Keberhasilan pencapaian kinerja juga terkait dengan ketersediaan Sumber Daya Manusia maupun sarana dan prasarana. Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan didukung oleh Jabatan Fungsional dari level pertama hingga utama yang cukup memadai yang memungkinkan untuk terwujudnya perencanaan yang baik, termasuk pemetaan risiko, pengidentifikasiannya kebutuhan sumber daya, dan pengembangan strategi pelaksanaan yang efektif. Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi berkala juga telah dilakukan oleh evaluator internal bersertifikasi.

Gambar 3.15
Sertifikat Evaluator Internal
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

5. Komitmen terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan akuntabilitas terhadap penggunaan sumber daya merupakan faktor penting. Komitmen terhadap transparansi dapat membangun kepercayaan masyarakat dan mengurangi risiko penyimpangan atau penyalahgunaan kebijakan. Selain itu adanya kepemimpinan yang kuat dalam memberikan arah, dorongan dan dukungan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.



Gambar 3.16
Dokumentasi Rapat Koordinasi Internal Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

FAKTOR PENGHAMBAT

Dalam upaya mewujudkan dan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kinerja /implementasi SAKIP, Adapun yang menjadi kendala adalah belum tersedianya teknologi informasi yang memungkinkan akses atas data perencanaan kinerja dan pengukuran kinerja yang terintegrasi khususnya dalam pengukuran indikator kinerja utama, sehingga pengukuran kinerja masih dilakukan secara manual.

UPAYA PERBAIKAN

Dalam rangka Implementasi SAKIP yang lebih baik, Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 17 Desember 2024. Telah dijelaskan pada pasal 28 bahwa setiap Perangkat Daerah melakukan pengelolaan data kinerja secara periodik per triwulan pada sistem informasi. Sistem informasi tersebut adalah aplikasi e-SAKIP. Saat ini aplikasi e-SAKIP dalam proses pengembangan dan integrasi dengan aplikasi lainnya oleh tim Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsin Kepulauan Riau dan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau beserta Tim SAKIP Provinsi Kepulauan Riau lainnya.

IKM BAPPEDA

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Pelibatan masyarakat ini menjadi penting seiring dengan adanya konsep pembangunan berkelanjutan. Serta adanya pelibatan masyarakat juga dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik lebih tepat sasaran.

Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 maka disusun Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Penilaian tersebut dilaksanakan secara periodik minimal 1 (satu) tahun sekali melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang merupakan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh penyelenggara unit pelayanan publik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), terdapat 9 unsur yang digunakan dalam perhitungan kualitas pelayanan publik, antara lain yaitu:

1. Persyaratan

- Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur

- Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.

3. Waktu Penyelesaian

- Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.

4. Biaya/Tarif

- Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara.

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan

- Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.

6. Kompetensi Pelaksana

- Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.

7. Perilaku Pelaksana

- Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

- Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut

9. Sarana dan prasarana

- Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam pelaksanaan pelayanan. Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pelayanan.

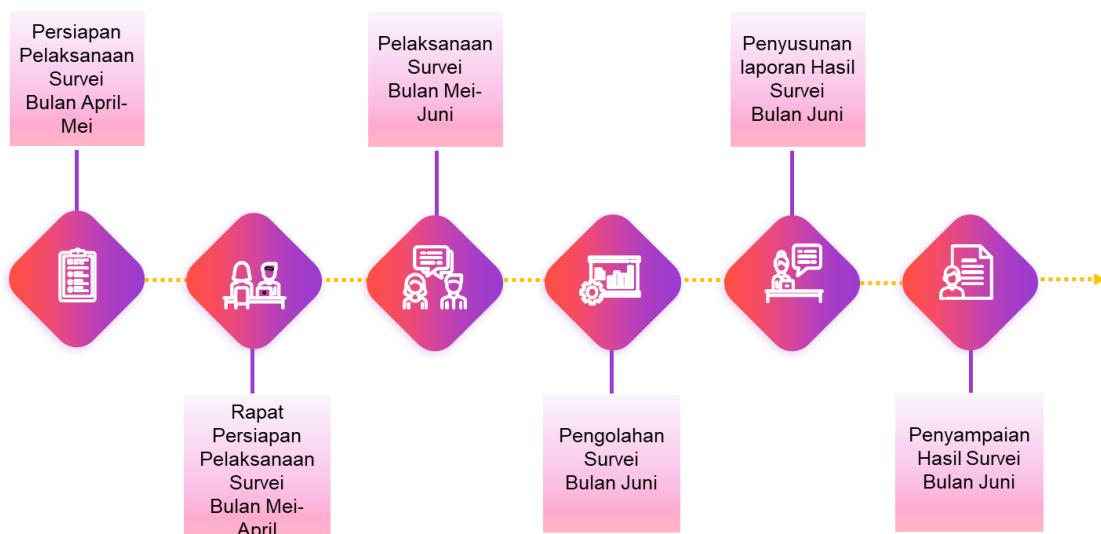
Gambar 3.17
Unsur Perhitungan Surveri Kepuasan Masyarakat

Desain bentuk jawaban dalam setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuesioner, berupa jawaban pertanyaan pilihan berganda. Bentuk pilihan jawaban pertanyaan kuesioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan. Tingkat kualitas pelayanan di mulai dari sangat baik/puas sampai dengan tidak baik/puas. Pembagian jawaban dibagi dalam 4 (empat) kategori, yaitu:

Tabel 3.21
Kategori dan Nilai Persepsi Jawaban Survei Kepuasan Masyarakat

No	Kategori	Nilai Persepsi
1.	Tidak Baik	1
2.	Kurang Baik	2
3.	Baik	3
4.	Sangat Baik	4

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah dan jadwal pelaksanaan, sebagai berikut:



Gambar 3.18
Tahapan Pelaksanaan Survei

Penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut sebagai berikut:

a. Persiapan Pelaksanaan Survei

Persiapan survei dimulai dengan penetapan pelaksana yang bertanggung jawab atas seluruh proses survei, apabila dilaksanakan secara swakelola perlu dibentuknya Tim penyusunan survei kepuasan masyarakat. Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dilaksanakan oleh pegawai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dengan susunan tim sebagai berikut:

Tabel 3.22
Tim Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Bappeda

No	Nama/Nip	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1.	Misni, S.K.M, M.Si	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Pengarah
2.	Achmad Ardiansyah, S.TP, M.A.P.	Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Ketua
3.	Nanny Nurviani, S.Sos	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Supervisor
4.	Herlina, SH	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur	Supervisor
5.	Raja Bintan Alamsyah Rambe, S.STP, M.S.M	Analisis Jabatan	Supervisor
6.	Rommy Khalid Ghifari, A.Md	Pengelola Data	Pengumpul Data
7.	Endah Lestari, S.M.	Pengelola Data	Pengumpul Data
8.	Hendra Suryanto, A.Md	Pengelola Data	Pengumpul Data
9.	Said Wahyu Putra	Tenaga Informasi dan Teknologi /Tenaga Teknis	Pengumpul Data
10.	Muhammad Ravi Putra	Tenaga Informasi dan Teknologi /Tenaga Teknis	Pengumpul Data

Setelah terbentuknya Tim Penyusun Survei tahapan selanjutnya adalah Penyiapan Bahan Survei sebagaimana yang telah dijelaskan pada mekanisme penilaian dengan jawaban-jawaban yang telah dibagi dalam beberapa kategori. Pelaksanaan Survei dilanjutkan dengan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) selaku Pembina data statistik sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa metode survei, instrumen pengukuran, serta proses analisis yang digunakan telah sesuai dengan standar yang berlaku.

Adapun dalam proses mendapatkan rekomendasi kegiatan statistik terlebih dahulu dilakukan koordinasi dan menyampaikan rancangan kegiatan statistik survei ini kepada BPS untuk kemudian dilakukan pemeriksaan, penelitian dan evaluasi terhadap rancangan kegiatan statistik.



Gambar 3.19
Koordinasi dan Penyampaian Rancangan Kegiatan Statistik ke BPS

Hasil pemeriksaan rancangan survei, BPS Provinsi Kepulauan Riau menilai Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Layak mendapatkan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Statistik dengan dikeluarkannya Surat Rekomendasi Statistik dengan nomor **V-24.2100.008** serta saran dan masukan dalam penyelenggaraan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau.

**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Jl. Ahmad Yani No. 21 Tanjungpinang 29124, Telp. (0771) 4500155, Fax. (0771) 4500157
e-mail: bps2100@bps.go.id website: http://kepri.bps.go.id

Nomor : B-232/21000/OT.130/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) set
Hal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Tanjungpinang, 28 Mei 2024

Yth.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau
di tempat

Sehubungan dengan pengajuan rekomendasi kegiatan statistik sektoral berikut:
judul : SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Penyelenggara : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

dan setelah menerima rancangan yang diajukan, maka kegiatan statistik tersebut:

Dinyatakan : **LAYAK**
dengan catatan evaluasi rancangan kegiatan statistik terlampir.

Identitas Rekomendasi : **V-24.2100.008**

Identitas rekomendasi harus dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja.

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, diucapkan terima kasih.

Kepala BPS Provinsi Kepulauan Riau,



Darwis Sitorus

Lampiran Surat
Nomor : B-232/21000/OT.130/2024
Tanggal : 28 Mei 2024

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
Penyelenggara	: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/V-24.2100.008

Rekomendasi :

1. Secara umum, terdapat perbaikan beberapa poin rincian pada formulir pengajuan rekomendasi statistik, yaitu:
 - a. Rancangan jadwal kegiatan dilakukan penyesuaian agar penyelenggaraan kegiatan statistik berjalan dengan baik
 - b. Mohon dilampirkan KAK sebagai pendukung tambahan
2. Penyelenggaraan kegiatan statistik menuju pada *Generic Statistical Business Process Model (GSBPM)* yang berlaku secara internasional.
 - a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis ter dokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka pengetahuan dan praktik dalam pelaksanaan kegiatan statistik.
 - b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perencangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, disseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.
3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.
 - a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.
 - b. Panduan penyusunan metadata statistik menuju pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyusunan Metadata Statistik.
4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk softcopy publikasi dan metadata paling lambat 28 Juli 2024.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Bapak/Sertifikat Elektronik (BSE). BSSN

Gambar 3.20
Surat Rekomendasi Kegiatan Statistik

b. Rapat Persiapan Pelaksanaan Survei

Setelah menentukan metodologi penelitian dan teknik sampling, tahapan selanjutnya dalam Survei Kepuasan Masyarakat adalah penetapan responden. Dalam metode *non-probability sampling*, responden dipilih berdasarkan pertimbangan subjektif surveyor, dengan memperhatikan karakteristik populasi yang disurvei. Penetapan responden dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi mereka terhadap layanan yang dinilai, seperti pengguna aktif layanan dalam kurun waktu tertentu atau kelompok masyarakat yang paling terdampak oleh kebijakan layanan tersebut. ditetapkannya jumlah responden sebanyak 60 (enam puluh) orang dengan masing-masing unit kerja melakukan survei terhadap 10 (sepuluh) orang dari masing-masing perwakilan bidang pada Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan.

Tabel 3.23
Jumlah Responden

No	Unit Kerja	Jumlah Responden
1	Sekretariat	10 orang
2	Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	10 orang
3	Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam	10 orang
4	Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahuan	10 orang
5	Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah	10 orang
6	Bidang Riset dan Inovasi Daerah	10 orang
Total		60 Orang

c. Pelaksanaan Survei

Penyebaran kuisioner bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari responden dalam suatu survei. Adapun penyebaran kuisioner pada survei ini menggunakan metode *Paper and Pencil Interviewing* (PAPI) dan *Computer Assisted Web Interviewing* (CAWI) dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:

1) *Paper and Pencil Interviewing* (PAPI)

Metode pengumpulan data di mana pengumpul data mendatangi responden secara langsung, membacakan pertanyaan dari kuesioner cetak, responden menjawab pertanyaan survei yang diberikan dalam bentuk kertas, dan pewawancara mencatat jawaban dengan menggunakan kertas dan pensil atau pena. Adapun kelebihan menggunakan metode ini adalah adanya interaksi langsung antar pengumpul data dan responden sehingga meningkatkan pemahaman responden tentang pertanyaan yang terdapat pada kuisioner sedangkan kelemahannya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama dan biaya tambahan cetak kuisioner dan alat tulis dan juga pengisian data rentan kesalahan dalam pencatatan dan penginputan data.



Gambar 3.21
Pelaksanaan Survei Dengan Menggunakan PAPI

2) *Computer Assisted Web Interviewing (CAWI)*

Metode pengumpulan data di mana responden menerima link kuesioner online yang dikirimkan melalui media *whatsapp* dan mengisi survei tersebut secara mandiri melalui komputer atau perangkat lain yang terhubung ke internet. Adapun kelebihan menggunakan metode ini adalah biaya yang lebih rendah dan pengolahan data lebih cepat karna data otomatis masuk kedalam *data base* mengurangi resiko kesalahan input sedangkan kelemahannya adalah pengisian kuisioner kurang maksimal karena responden tidak memahami pertanyaan ataupun tidak adanya interaksi langsung membuat pengisian kuisioner secara asal-asalan.



Gambar 3.22
Pelaksanaan Survei Dengan Menggunakan CAWI

Agar hasil pelaksanaan survei dapat menunjukkan hasil yang sebenarnya tim survei melakukan metode pengumpulan data dengan melihat kondisi dilapangan yang apabila memungkinkan pengumpul data menggabungkan metode tersebut diatas pada pelaksanaan pengumpulan data agar dapat meminimalisir kekurangan-kekurangan pada setiap metode sehingga hasil pengisian kuisioner dapat dilaksanakan secara maksimal.

d. Pengolahan Hasil Survei

Dalam pelaksanaan survei kepuasan masyarakat, pengisian kuisioner dilakukan sendiri oleh responden dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuisioner) sebagai alat bantu pengumpulan data kepuasan Masyarakat yang telah ditetapkan. Data yang terkumpul kemudian dapat digunakan dalam proses evaluasi terhadap layanan yang disurvei untuk mengumpulkan umpan balik dari responden yang menjadi penerima layanan.

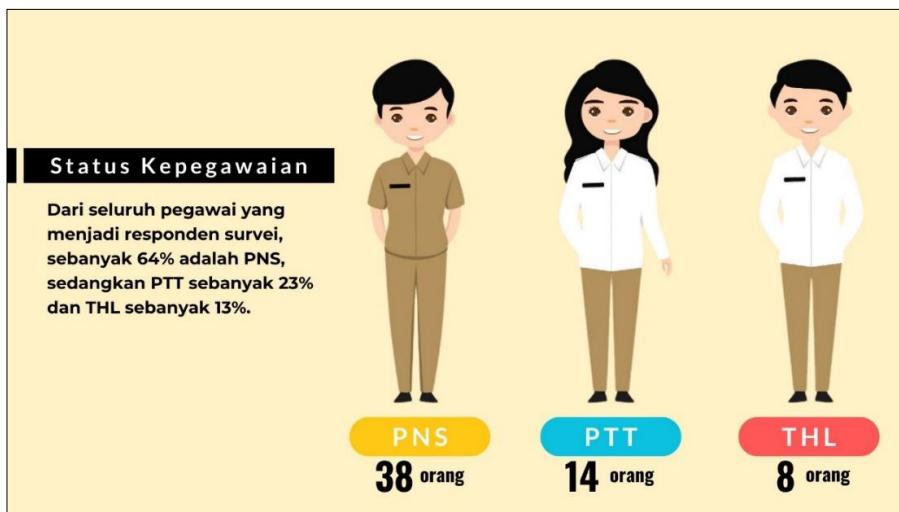
Berdasarkan hasil penyebaran kuesioner dapat diketahui bahwa responden Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 60 orang, terdiri dari 30 (tiga puluh) orang perempuan dan 30 (tiga puluh) orang perempuan.



Gambar 3.23

Jenis Kelamin dan Pendidikan Responden Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Dalam Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau, tingkat pendidikan responden menunjukkan latar belakang akademik yang beragam. Dari total responden yang berpartisipasi, 15 orang memiliki pendidikan terakhir SMA, 5 orang berpendidikan DIII, 30 orang memiliki gelar DIV/S1, dan 10 orang telah menyelesaikan pendidikan hingga tingkat S2. Variasi tingkat pendidikan ini mencerminkan keberagaman dalam persepsi dan pengalaman responden terhadap layanan yang diberikan.



Gambar 3.24

Satus Kepegawaian Responden Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Selain itu, responden dalam survei ini juga memiliki status kepegawaian yang berbeda-beda. pegawai yang disurvei berstatus PNS sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, PTT sebanyak 14 (empat belas) orang dan THL sebanyak 8

(delapan) orang. Dengan adanya seluruh status kepegawaian yang ikut serta pada survei, maka sampel yang ada diharapkan dapat mewakili gambaran umum pegawai yang ada dilingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Setelah pengisian kuisioner oleh responen kemudian dilakukan pengolahan data. Pengolahan data dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" pada masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan survei kepuasan masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama. Nilai penimbang ditetapkan dengan rumus, sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata- Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,11$$

**Gambar 3.25
Rumus Nilai Penimbang**

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

**Gambar 3.26
Rumus SKM**

Sedangkan Untuk memudahkan interpretasi terhadap nilai SKM yaitu antara 25 – 100, maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar, dengan rumus berikut:

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

**Gambar 3.27
Rumus Konversi SKM**

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017, setelah perhitungan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dilakukan, hasilnya dikonversi ke dalam skala 25 – 100 untuk memudahkan interpretasi. Konversi ini disajikan dalam tabel yang mencakup nilai persepsi, nilai interval, nilai interval konversi, mutu pelayanan, dan kinerja unit pelayanan. Berikut adalah tabel standar yang digunakan dalam interpretasi hasil IKM:

Tabel 3.24
Standart Interpretasi Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi (Nik)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

Adapun hasil perhitungan Survei Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau sebagai berikut:

Tabel 3.25
Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	Nilai Rata-Rata Tertimbang/Pertanyaan	Nilai Rata-Rata Unsur Terimbang	Kategori
Persyaratan	216	0,400	3,600	Sangat Baik
Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	240	0,444	4,000	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	214	0,396	3,567	Sangat Baik
Biaya/Tarif	240	0,444	4,000	Sangat Baik
Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	212	0,393	3,533	Sangat Baik

Unsur	Nilai Rata-Rata Unsur	Nilai Rata-Rata Tertimbang/Pertanyaan	Nilai Rata-Rata Unsur Terimbang	Kategori
Kompetensi Pelaksana	219	0,406	3,650	Sangat Baik
Perilaku Pelaksana	213	0,394	3,550	Sangat Baik
Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	191	0,354	3,183	Baik
Sarana dan Prasarana	210	0,389	3,500	Sangat Baik
HASIL TOTAL	90,093			Sangat Baik

Dari hasil penilaian terhadap 9 unsur pelayanan publik, didapatkan bahwa 8 unsur telah mencapai kategori "Sangat Baik" (A), yang menandakan bahwa unsur-unsur tersebut telah terlaksana secara optimal dan harus terus dipertahankan. Sedangkan, unsur penanganan pengaduan, saran, dan masukan masih berada pada kategori "Baik" (B), mengindikasikan perlunya berbagai langkah perbaikan agar unsur tersebut dapat ditingkatkan ke tingkat "Sangat Baik" seperti unsur-unsur lainnya. Berdasarkan keseluruhan penilaian dari sembilan unsur tersebut, diperoleh hasil akhir Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar **90,093** yang menunjukkan bahwa mutu pelayanan secara keseluruhan berada pada kategori "**Sangat Baik**".

CAPAIAN KINERJA



Tabel 3.26

Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024

Sasaran Strategis PD	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	90 (Kategori Sangat Baik)	90,093 (Kategori Sangat Baik)	100,10 %

Tabel 3.27

Perbandingan Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 dengan Periode Sebelumnya

Indikator Kinerja	Capaian Kinerja			Keterangan
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	84,81 (Kategori Baik)	84,81 (Kategori Baik)	90,093 (Kategori Sangat Baik)	Meningkat

Tabel 3.28
Perbandingan Capaian Kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda
Tahun 2024 dengan Target Akhir Renstra

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Kondisi Akhir Periode Renstra	Capaian Kinerja
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	90,093 (Kategori Sangat Baik)	92 (Kategori Sangat Baik)	97,93%

Berdasarkan tabel yang disajikan, terdapat peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dari periode sebelumnya ke tahun 2024. Hal ini dapat diartikan bahwa sebagian besar unsur pelayanan telah berjalan dengan baik dan mendapat apresiasi lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan target akhir periode dokumen Rencana Strategis (Renstra), dapat disampaikan bahwa meskipun target akhir belum sepenuhnya tercapai, unit pelayanan telah hampir memenuhi standar yang direncanakan dalam dokumen Renstra. Dengan capaian ini, Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau hanya perlu melakukan sedikit peningkatan pada aspek yang masih memerlukan perbaikan, terutama unsur "penanganan pengaduan, saran, dan masukan", yang masih dalam kategori "Baik".

Tabel 3.29
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dengan Rata-Rata Nasional

Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Rata-Rata Nasional	Keterangan
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Bappeda	90,093 (Kategori Sangat Baik)	NA	

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Keberhasilan capaian kinerja indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 telah mendapatkan hasil yang sangat memuaskan, hal ini ditunjukkan dari beberapa faktor yang mendukung keberhasilan antara lain yaitu:

1. Kompetensi dan Profesionalisme Petugas Petugas pelayanan memiliki keterampilan dan sikap profesional yang mendukung kenyamanan dan kepuasan masyarakat dalam menerima layanan.
2. Proses dan Prosedur yang Jelas Standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan sudah diterapkan dengan baik sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang jelas dan proses layanan yang efisien.
3. Ketersediaan Sarana dan Prasarana fasilitas pendukung pelayanan telah berfungsi dengan baik dan menunjang efektivitas pelayanan publik.
4. Komitmen terhadap Peningkatan Layanan Adanya evaluasi rutin dan tindak lanjut terhadap hasil survei menunjukkan bahwa instansi memiliki komitmen tinggi dalam meningkatkan mutu pelayanan.

FAKTOR PENGHAMBAT

Meskipun capaian Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, namun masih terdapat satu unsur yang berada dalam kategori "Baik" (B), yaitu penanganan pengaduan, saran, dan masukan. Beberapa kelemahan yang ditemukan dalam unsur ini meliputi:

1. Ketidakhadiran Petugas di Meja Pelayanan Ditemukan bahwa petugas yang seharusnya berjaga di meja pelayanan tidak selalu hadir selama jam kerja, menyebabkan pengunjung kesulitan mendapatkan informasi yang dibutuhkan secara langsung.
2. Tidak Tersedianya Kotak Pengaduan di Tempat Strategis Kotak pengaduan belum tersedia di lokasi yang mudah diakses oleh pengunjung, sehingga peluang bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan atau saran menjadi terbatas.

3. Kurangnya Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Tidak adanya sistem yang efektif dalam menangani pengaduan dapat menyebabkan keluhan masyarakat tidak tersampaikan dengan baik dan tidak segera ditindaklanjuti.

UPAYA PERBAIKAN

Untuk mengatasi kelemahan yang ada, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau telah menyusun rencana tindak lanjut dengan dua program utama yang diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan, khususnya dalam aspek penanganan pengaduan, saran, dan masukan:

1. Penyediaan Petugas Pelayanan
2. Memastikan bahwa setiap pengunjung yang datang dapat langsung berinteraksi dengan petugas yang siap melayani.
3. Menyediakan layanan pengaduan baik secara langsung maupun secara *online* yang dapat diakses 24 jam oleh masyarakat
4. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pengaduan yang ada dan menindaklanjuti setiap saran dan keluhan yang masuk.

PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PENDUKUNG

Untuk memastikan tercapainya target dari sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah” dengan indikator Nilai SAKIP dan Indeks Kepuasan Masyarakat, adapun Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang mendukung antara lain:

- I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - c. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - c. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir
 - f. Sub Kegiatan koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - f. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - g. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - b. Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



REALISASI DAN EFISIENSI ANGGARAN

Pada Tahun 2024 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau mengelola Anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi Kepulauan Riau TA. 2024 sebesar Rp. 35.345.649.342,00 yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp. 20.666.203.524,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.14.304.163.587,00 serta Belanja Modal sebesar Rp. 375.282.231,00. Sedangkan untuk Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau mengalami rasionalisasi sehingga pagu anggaran berubah menjadi Rp. 33.576.963.459,00 dengan rincian Belanja Pegawai sebesar Rp. 20.746.897.529,98,00 dan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 12.301.000.481,02 serta Belanja Modal sebesar Rp. 529.065.448,00. Dari total pagu anggaran tersebut telah terealisasi sebesar Rp. 33.330.453.821,00 atau sebesar 99,27%.



**Gambar 3.28
Diagram Realisasi Anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024**

Adapun uraian dari realisasi anggaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dapat dilihat pada tabel berikut:



Tabel 3.30
Realisasi Keuangan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU APBDP	REALISASI KEUANGAN		SISA PAGU ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan	33.576.963.459,00	33.330.453.821,00	99,27	246.509.638,00
1	Program Perencanaan Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	3.741.181.127,01	3.721.941.666,00	99,49	19.239.461,01
1.1.	Penyusunan Perencanaan Pendanaan	2.974.022.856,00	2.956.455.575,00	99,41	17.567.281,00
1.1.1	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	83.691.750,00	83.444.950,00	99,71	246.800,00
1.1.2	Pelaksanaan Konsultasi Publik	72.323.175,00	72.316.175,00	99,99	7.000,00
1.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah	204.366.174,00	202.348.229,00	99,01	2.017.945,00
1.1.4	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	578.229.389,00	578.215.389,00	100	14.000,00
1.1.5	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	2.035.412.368,00	2.020.130.832,00	99,25	15.281.536,00
1.2	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah	22.298.883,01	22.298.800,00	100	83,01
1.2.1	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah	22.298.883,01	22.298.800,00	100	83,01
1.3	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	744.859.388,00	743.187.291,00	99,78	1.672.097,00
1.3.1	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	318.663.405,00	317.984.708,00	99,79	678.697,00
1.3.3	Fasilitasi/ Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	426.195.983,00	425.202.583,00	99,77	993.400,00
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.851.430.388,81	1.836.513.295,00	99,19	14.917.093,81
2.1	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	509.015.749,81	502.152.238,00	98,65	6.863.511,81
2.1.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	130.664.500,80	128.499.754,00	98,34	2.164.746,80

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU APBDP	REALISASI KEUANGAN		SISA PAGU ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
2.1.2	Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	25.654.690,01	24.663.890,00	96,14	990.800,01
2.1.3	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	31.047.300,00	30.777.887,00	99,13	269.413,00
2.1.4	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	70.217.159,00	69.050.510,00	98,34	1.166.649,00
2.1.5	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	137.789.000,00	136.822.845,00	99,30	966.155,00
2.1.6	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	113.643.100,00	112.337.352,00	98,85	1.305.748,00
2.2	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	552.296.939,00	551.047.385,00	99,77	1.249.554,00
2.2.1	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	379.903.814,00	379.870.471,00	99,99	33.343,00
2.2.2	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, ROJMD dan RKPD)	172.393.125,00	171.176.914,00	99,29	1.216.211,00
2.3	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	790.117.700,00	783.313.672,00	99,14	6.804.028,00
2.3.1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, ROJMD dan RKPD)	136.422.800,00	134.704.900,00	98,74	1.717.900,00
2.3.2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	112.715.100,00	111.578.875,00	98,99	1.136.225,00
2.3.3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	145.438.400,00	144.195.219,00	99,15	1.243.181,00
2.3.4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	395.541.400,00	392.834.678,00	99,32	2.706.722,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU APBDP	REALISASI KEUANGAN		SISA PAGU ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	743.490.996,43	742.584.939,00	99,88	906.057,43
3.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	551.080.096,02	550.472.973,00	99,89	607.123,02
3.1.2	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	160.217.150,04	160.217.150,00	100	0,04
3.1.1	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	215.169.981,47	214.581.381,00	99,73	588.600,47
3.1.3	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	175.692.964,51	175.674.442,00	99,99	18.522,51
3.2	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	192.410.900,41	192.111.966,00	99,84	298.934,41
3.2.1	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	192.410.900,41	192.111.966,00	99,84	298.934,41
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	27.240.860.946,75	27.029.413.921,00	99,22	211.447.025,75
4.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	162.583.333,00	162.341.333,00	99,85	242.000,00
4.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	106.369.473,00	106.127.473,00	99,77	242.000,00
4.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19.496.159,00	19.496.159,00	100	-
4.1.3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	36.717.701,00	36.717.701,00	100	-
4.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.869.688.129,98	20.710.006.429,00	99,23	159.681.700,98
4.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.136.151.529,98	19.976.942.727,00	99,21	159.208.802,98
4.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	614.772.000,00	614.735.000,00	99,99	37.000,00
4.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	33.026.200,00	32.926.613,00	99,70	99.587,00
4.2.4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	38.733.000,00	38.535.686,00	99,49	197.314,00
4.2.5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	27.803.600,00	27.692.710,00	99,60	110.890,00

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU APBDP	REALISASI KEUANGAN		SISA PAGU ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
4.2.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	19.201.800,00	19.173.693,00	99,85	28.107,00
4.3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	726.000,00	726.000,00	100	-
4.3.1	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada PSKPD	726.000,00	726.000,00	100	-
4.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	32.164.000,00	29.229.978,00	90,88	2.934.022,00
4.4.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	32.164.000,00	29.229.978,00	90,88	2.934.022,00
4.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.666.640.378,00	1.640.389.204,00	98,42	26.251.174,00
4.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	58.993.725,00	58.987.009,00	99,99	6.716,00
4.5.2	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	99.994.905,00	99.917.430,00	99,92	77.475,00
4.5.3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	249.994.023,00	249.671.000,00	99,87	323.023,00
4.5.4	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	233.551.770,00	232.882.500,00	99,71	669.270,00
4.5.5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	85.360.000,00	85.120.000,00	99,72	240.000,00
4.5.6	Fasilitasi Kunjungan Tamu	227.015.955,00	205.316.069,00	90,44	21.699.886,00
4.5.7	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	711.730.000,00	708.495.196,00	99,55	3.234.804,00
4.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.203.848,00	72.375.000,00	94,98	3.828.848,00
4.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	76.203.848,00	72.375.000,00	94,98	3.828.848,00
4.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.941.051.283,77	2.929.094.990,00	99,59	11.956.293,77
4.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12.550.000,00	12.550.000,00	100	-
4.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	82.890.000,00	81.419.406,00	98,23	1.470.594,00
4.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	236.400.000,00	236.400.000,00	100	-

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	PAGU APBDP	REALISASI KEUANGAN		SISA PAGU ANGGARAN
			Rp	%	
1	2	3	4	5	6
4.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.609.211.283,77	2.598.725.584,00	99,60	10.485.699,77
4.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.491.803.974,00	1.485.250.987,00	99,56	6.552.987,00
4.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	78.757.900,00	78.757.900,00	100	-
4.8.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	396.329.650,00	396.329.650,00	100	-
4.8.3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.621.000,00	49.621.000,00	100	-
4.8.4	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	967.095.424,00	960.542.437,00	99,32	6.552.987,00



BAB IV

PENUTUP

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban atas program dan kegiatan strategis yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *Good Governance*. Penyusunan LKjIP juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban terhadap keberhasilan dan kegagalan kinerja yang dicapai, yang disusun secara jujur, objektif, akurat dan transparan. Keberhasilan atas pencapaian target indikator dari program kegiatan yang telah ditetapkan adalah tidak lepas dari peran serta semua pihak yang terlibat didalam pencapaian indikator sasaran. Keberhasilan tersebut merupakan cerminan dari telah berjalannya sistem kerja di lingkungan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau dan didukung oleh suasana kerja yang dinamis dan bersinergis satu sama lainnya. Atas keberhasilan yang telah dicapai tersebut tentunya perlu diberikan apresiasi atau penghargaan kepada semua pihak yang berperan serta didalamnya.

Terhadap Rekomendasi Hasil Evaluasi atas SAKIP Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun sebelumnya telah dilakukan tindaklanjut sebagai berikut

Tabel 4.1
**Tindak Lanjut Rekomendasi Evaluasi SAKIP Badan Perencanaan
Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023**

NO	REKOMENDASI	TINDAK LANJUT	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Melakukan pengumpulan data kinerja dengan sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Infromasi (Aplikasi) sedang dalam proses persiapan pemanfaatan teknologi informasi.	Provinsi Kepulauan Riau telah menetapkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada tanggal 17 Desember 2024. Telah dijelaskan pada pasal 28 bahwa setiap Perangkat Daerah melakukan pengelolaan data kinerja secara periodik per triwulan pada sistem informasi. Sistem informasi tersebut adalah aplikasi e-SAKIP. Saat ini aplikasi e-SAKIP dalam proses pengembangan dan integrasi dengan aplikasi lainnya oleh tim Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsin Kepulauan Riau dan Tim SAKIP Provinsi Kepulauan Riau	Paling lambat 2 tahun sejak diterbitkan Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 51 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (17 Desember 2024)
2.	Melakukan pengukuran capaian kinerja dengan sepenuhnya memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dimana pengukuran kinerja perangkat daerah dalam pencapaian IKU masih dilakukan secara manual.		

Kedepan, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau akan terus berupaya secara optimal untuk memperbaiki kinerjanya dalam kerangka mengatasi kendala dan hambatan yang ada. Upaya Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penyusunan perencanaan kinerja akan tetap dijaga secara akurat dan cermat, serta berdasarkan indikator kinerja yang disepakati secara bersama-sama dengan para *stakeholders*, sehingga pelaksanaan pembangunan nantinya dapat dievaluasi dan diukur kinerjanya secara obyektif. Selain itu, proses perencanaan akan lebih dioptimalkan sehingga rencana kegiatan yang akan dibuat dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna secara maksimal;
2. Meningkatkan dan menguatkan koordinasi, komunikasi dan kerjasama dalam rangka mewujudkan optimalisasi sinkronisasi dan keselarasan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah maupun nasional;
3. Meningkatkan pemanfaatan kelitbangsaan dan inovasi dengan melibatkan berbagai pihak seperti akademisi, dunia usaha dan sektor lainnya;
4. Melakukan koordinasi rutin dilingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan dalam rangka antisipasi potensi tantangan/resiko yang perlu dikelola di kemudian hari.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : MISNI, S.K.M., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.
Jabatan : Gubernur Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

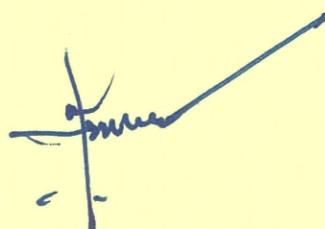
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan Kualitas dan Kesesuaian Melalui Integrasi, Sinkronisasi dan Sinergitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Indeks Perencanaan	93,67
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah dari Hasil Penelitian, Pengembangan dan Inovasi	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangam	85
		Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	45
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat	83

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 27.348.756.087,-	APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 4.436.075.805,-	APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 2.566.331.650,-	APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 994.485.800,-	APBD

Tanjungpinang, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA,
GUBERNUR KEPULAUAN RIAU



H. ANSAR AHMAD, S.E., M.M.

PIHAK PERTAMA,
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **ACHMAD ARDIANSYAH, S.TP**

Jabatan : **Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MISNI, S.K.M., M.Si**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007**

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

10000
SEPULUH RIBU RUPIAH
METERAI TEMPAL
C888AAKX773983123

**ACHMAD ARDIANSYAH, S.TP
Pembina Tk. I
NIP. 19701012 200003 1 004**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %
		1. Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD	100 %
		a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
		b. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
		c. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
		2. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan
		b. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
		c. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
		d. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
		e. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		f. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan
		3. Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %
		a. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
		4. Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		b. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
		c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
		d. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		e. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
		f. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
		g. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
		5. Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		a. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit
		6. Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
		c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
		7. Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit
		b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
		c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1076 Unit
		d. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 20,899,465,191,-	APBD
<ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 	Rp. 126,418,331,-	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 35,509,820,-	
• Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 64,555,716,-	
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 19,948,167,424,-	
• Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 724,813,900,-	

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

Pihak Pertama,

**SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ACHMAD ARDIANSYAH, S.TP
Pembina Tk. I
NIP. 19701012 200003 1 004



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARMAN, ST**

Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MISNI, S.K.M., M.Si**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 19903 2 007

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ARMAN, ST
Pembina
NIP. 19790812 200701 1 009

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN
DAERAH, BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota	86%
		1. Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	100%
		a. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen
		b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen
		2. Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100%
		a. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan
		b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	21 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3,364,296,288,-	APBD
a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
• Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp. 87,350,000,-	
• Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rp. 2,276,456,905,-	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
b. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
<ul style="list-style-type: none"> • Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi • Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota 	Rp. 446,776,369,- Rp. 553,713,014,-	

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN,
EVALUASI DAN PELAPORAN
PEMBANGUNAN DAERAH
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ARMAN, ST
Pembina
NIP. 19790812 200701 1 009



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **NUR AISYAH FATMASARI, S.E., M.M.**

Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MISNI, S.K.M., M.Si**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



NUR AISYAH FATMASARI, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19800412 201001 2 015

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA, BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota	86%
		1. Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	100%
		a. Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	3 Berita Acara
		Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD	100%
		Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	95%
		1. Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
		2. Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
		3. Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%
		a. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
		b. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		(3)	(4)
(1)	(2)		
		c. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan
		d. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
		e. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
		f. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 208,253,905,-	APBD
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp. 208,253,905,-	
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 830,305,000,-	APBD
a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
• Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 162,098,800,-	
• Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 138,034,600,-	
• Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan	Rp. 32,364,100,-	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan		
• Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 137,097,400,-	
• Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 222,097,300,-	
• Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 138,612,800,-	

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA**
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



NUR AISYAH FATMASARI, S.E., M.M.
Pembina
NIP. 19800412 201001 2 015



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **ZULKARNAEN ADIJAYA, S.T., M.M.**

Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MISNI, S.K.M., M.Si**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ZULKARNAEN ADIJAYA, S.T., M.M.
Pembina
NIP. 19821014 200803 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota	86%
		1. Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan yang tersusun	100%
	a. Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara	
	b. Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara	
	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD	100%	
	Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	95%	
	1. Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Perekonominian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	
	2. Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Perekonominian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	
	3. Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Perekonominian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	
	a. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonominian	1 Laporan	
	b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen	
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100%
		1. Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 722,748,441,-	APBD
a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
• Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp. 87,985,081,-	
• Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Rp. 634,763,360,-	
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 700,389,600,-	APBD
a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
• Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 436,928,500,-	
• Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 263,461,100,-	
3. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 255,078,000,-	APBD
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 255,078,000,-	

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



ZULKARNAEN ADIJAYA, S.T., M.M.
Pembina
NIP. 19821014 200803 1 001



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **UDI HARBIAN, ST., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahhan,
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MISNI, S.K.M., M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



UDI HARBIAN, ST., M.M.
Pembina
NIP. 19840520 200803 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN,
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan	Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD	100%
		Persentase keselarasan muatan RKA perangkat Daerah dengan RKPD	95%
		1. Persentase Keselarasan Muatan Renja Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	100%
		2. Persentase Keselarasan Muatan RKA Perangkat Daerah Dengan RKPD Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	100%
		3. Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	100%
		a. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
		b. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
		c. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
		d. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1,035,637,050,-	APBD
a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah		
• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 145,884,100,-	
• Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 116,022,500,-	
• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 251,559,550,-	
• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 522,170,900,-	

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PERENCANAAN
INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



UDI HARBIAN, ST., M.M.
Pembina
NIP. 19840520 200803 1 003



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAYMOND RAYENDRA ELVEN,S.Si,M.S.E,MA**
Jabatan : **Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MISNI, S.K.M., M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



RAYMOND RAYENDRA ELVEN,S.Si,M.S.E,MA
Pembina
NIP. 19811211 200604 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	85%
		1. Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	60%
		a. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan
		b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan
		c. Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen
2.	Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	45%
		1. Persentase fasilitasi penerapan inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah yang terlaksana	60%
		a. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan
3.	Indeks Perencanaan	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota	86%
		1. Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana a. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 994,485,800,-	APBD
a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
• Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Rp. 214,517,800,-	
• Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Rp. 281,009,500,-	
• Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbang dan Peraturan	Rp. 261,037,000,-	
b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
• Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp. 237,921,500,-	
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 27,500,000,-	APBD
a. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
• Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 27,500,000,-	

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007



RAYMOND RAYENDRA ELVEN,S.Si,M.S.E,MA
Pembina
NIP. 19811211 200604 1 008

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RAYMOND RAYENDRA ELVEN,S.Si,M.S.E,MA**
Jabatan : **Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MISNI, S.K.M., M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

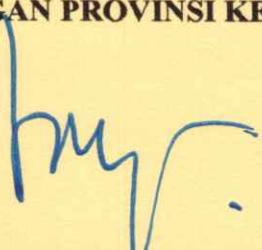
**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**


MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**




RAYMOND RAYENDRA ELVEN,S.Si,M.S.E,MA
Pembina
NIP. 19811211 200604 1 008

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Pemanfaatan hasil kelitbangan	Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan	85%
		1. Persentase Ketercapaian Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan berkualitas	60%
		a. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan
		b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan
		c. Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen
2.	Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah	45%
		1. Persentase fasilitasi penerapan penerapan inovasi perangkat daerah serta kebijakan inovasi di daerah yang terlaksana	60%
		a. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan
3.	Indeks Perencanaan	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota	86%
		1. Persentase Analisis Data dan Informasi Pemerintahan	100%

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
		Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	
		a. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 994,485,800,-	APBD
a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
• Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Rp. 214,517,800,-	
• Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Rp. 281,009,500,-	
• Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Rp. 261,037,000,-	
b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
• Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp. 237,921,500,-	
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 27,500,000,-	APBD
a. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
• Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 27,500,000,-	

Tanjungpinang, 22 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007



Pihak Pertama,

**KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

RAYMOND RAYENDRA ELVEN, S.Si, M.S.E, MA
Pembina
NIP. 19811211 200604 1 008



PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **NANNY NURVIANI, S.Sos**
Jabatan : **Kasubbag Umum dan Kepegawaian**
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **MISNI, S.K.M., M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan**
Provinsi Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

Pihak Pertama,

**KASUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN**
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU



NANNY NURVIANI, S.Sos
Penata
NIP. 19880704 201503 2 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan	Persentase Keselarasan Muatan RKPD Provinsi dengan RKPD Kab/Kota	86%
		1. Persentase Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah yang terlaksana	100%
		a. Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	2 Laporan
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tingkat Kelancaran Pelayanan Administrasi Kantor	100 %
		1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
		b. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
		c. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		d. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
		2. Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %
		a. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		3. Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		b. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
		c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
		d. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		e. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
		f. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
		g. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
		4. Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
		a. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit
		5. Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
		c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		6. Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit
		b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
		c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1076 Unit
		d. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Kegiatan/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 113,277,171,-	APBD
a. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
• Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Rp. 113,277,171,-	
2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 6,194,212,896,-	APBD
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
• Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 37,102,740,-	
• Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 45,350,900,-	
• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 32,250,600,-	
• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Rp. 28,042,520,-	

Kegiatan/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
• Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 24,890,860,-	
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 58,993,725,-	
• Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 99,994,905,-	
• Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 249,995,976,-	
• Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 153,875,415,-	
• Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 121,800,000,-	
• Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 239,174,955,-	
• Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 585,118,000,-	
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
• Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 120,143,625,-	
e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 15.070.000,-	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 102,676,800,-	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.2,811,890,133,-	

Kegiatan/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 95,062,100,-	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 450,983,537,-	
• Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 50,838,000,-	
• Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 799,981,105,-	

Tanjungpinang, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



MISNI, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19730516 199903 2 007

Pihak Pertama,
**KASUBBAG UMUM
DAN KEPEGAWAIAN
BADAN PERENCANAAN DAN LITBANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**



NANNY NURVIANI, S.Sos
Penata
NIP. 19880704 201503 2 003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : MISNI, S.K.M., M.Si

Jabatan : Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : Hj. Marlin Agustina, S.H.

Jabatan : Plt. Gubernur Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Plt. Gubernur Kepulauan Riau

Pihak Pertama,
Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

Hj. Marlin Agustina, S.H.



Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkualitas	Indeks Perencanaan Pembangunan	Baik
2.	Terwujudnya Rumusan Kebijakan Pembangunan dari Hasil Riset dan Inovasi Daerah	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	100 %
		Indeks Inovasi Daerah	Inovatif
3.	Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	BB
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	90

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 27.240.860.946,75	P APBD
2. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 3.741.181.127,01	P APBD
3. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 1.851.430.388,81	P APBD
4. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 743.490.996,43	P APBD

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua, Plt. Gubernur Kepulauan Riau	Pihak Pertama, Kepala Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau
--	--


Hj. Marlin Agustina, S.H.



Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : Achmad Ardiansyah, S.TP., M.A.P
Jabatan : Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Misni, S.K.M., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Pertama,

Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau



Achmad Ardiansyah, S.TP., M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197010122000031004

Pihak Kedua,

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau



Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Nilai SAKIP Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	100 %
		1. Persentase Pemenuhan Penyusunan Perencanaan, Penganggaran Dan Evaluasi Kinerja PD	100 %
		a. Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen
		b. Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan
		c. Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	2. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan
		b. Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen
		c. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
		d. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
		e. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		f. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Laporan
		3. Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %
		a. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
		4. Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		b. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
		c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
		d. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		e. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen
		f. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
		g. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
		5. Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		a. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit
		6. Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
		c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
		7. Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit
		b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
		c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1076 Unit
		d. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 20,913,506,862.98	P APBD
a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah • Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 106.369.473,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 19.496.159,00	
• Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 36.717.701,00	
b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 20.136.151.529,98	
• Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 614.772.000,00	

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

Sekretaris Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau



Achmad Ardiansyah, S.TP., M.A.P
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 197010122000031004



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Arman, ST
Jabatan : Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Misni, S.K.M., M.Si
Jabatan : Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau



Arman, ST
Pembina (IV/a)
NIP 197908122007011009

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BIDANG PERENCANAAN, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN
DAERAH, BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	90%
		Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD	90%
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Yang Disusun	20 Dokumen
		a. Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	15 Dokumen
		b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	5 Dokumen
		2. Jumlah Dokumen Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	33 Dokumen
		a. Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5 Laporan
		b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	28 Dokumen

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 2.863.963.506,00	P APBD
a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
• Sub Kegiatan Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Rp. 83.691.750,00	
• Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Rp. 2.035.412.368,00	

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
b. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
• Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Rp. 318.663.405,00	
• Sub Kegiatan Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 426.195.983,00	

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,

**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

**Kepala Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**



Arman, ST
Pembina (IV/a)
NIP 197908122007011009



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Nur Aisyah Fatmasari, S.E., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Misni, S.K.M., M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Pihak Pertama,
Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Nur Aisyah Fatmasari, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198004122010012015



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN
MANUSIA, BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	90%
		Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD	90%
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Yang Disusun	1 Dokumen
		a. Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara
		Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Sumber Daya Manusia	90%
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen
		2. Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5 Laporan
		a. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
		b. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan
		c. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	1 Laporan
		d. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
		e. Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan
		f. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 204.366.174,00	P APBD
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Rp. 204.366.174,00	
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 509.015.749,81	P APBD
a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		
• Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 130.664.500,80	
• Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 25.654.690,01	
• Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Rp. 31.047.300,00	
• Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 70.217.159,00	
• Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 137.789.000,00	
• Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Rp. 113.643.100,00	

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,

**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian
dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

**Kepala Bidang Perencanaan Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**



Nur Aisyah Fatmasari, S.E., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198004122010012015



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Zulkarnaen Adijaya, S.T., M.M.**
Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Misni, S.K.M., M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Pihak Pertama,

Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian dan Sumber Daya Alam Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau


Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007




Zulkarnaen Adijaya, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198210142008031001

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA
ALAM BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	90%
		Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD	90%
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Yang Disusun	3 Dokumen
		a. Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	1 Berita Acara
		b. Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara
		Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Ekonomi dan Sumber Daya Alam	90%
		1. Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Dokumen
		2. Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1 Laporan
		a. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	1 Laporan
		b. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
2.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	100%
		1. Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%
		a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	1 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 650.552.564,00	P APBD
a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		
• Sub Kegiatan Pelaksanaan Konsultasi Publik	Rp. 72.323.175,00	
• Sub Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Rp. 578.229.389,00	
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 552.296.939,00	P APBD
a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)		
• Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Rp. 379.903.814,00	
• Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 172.393.125,00	
3. Program Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 236.400.000,00	P APBD
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 236.400.000,00	

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,

**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

**Kepala Bidang Perencanaan Perekonomian
dan Sumber Daya Alam
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**



Zulkarnaen Adijaya, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198210142008031001



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Udi Harbian, ST., M.M.**

Jabatan : **Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahani,
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Misni, S.K.M., M.Si**

Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,

**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

**Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007**

Pihak Pertama,

**Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur
dan Kewilayahani
Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**



**Udi Harbian, ST., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP 198405202008031003**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG PERENCANAAN INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN,
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Persentase konsistensi Program/Kegiatan Renja Perangkat Daerah dengan DPA Perangkat Daerah Mitra Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahannya	90%
		1. Jumlah Dokumen Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	1 Dokumen
		2. Jumlah Laporan Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya	3 Laporan
		a. Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	1 Dokumen
		b. Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
		c. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan
		d. Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 790.117.700,00	P APBD
a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahannya		
• Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Rp. 136.422.800,00	
• Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 112.715.100,00	
• Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 145.438.400,00	
• Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	Rp. 395.541.400,00	

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
 Provinsi Kepulauan Riau**

Misni, S.K.M., M.Si
 Pembina Utama Madya (IV/d)
 NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,
**Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahannya
 Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau**



Udi Harbian, ST., M.M.
 Pembina (IV/a)
 NIP 198405202008031003



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Raymond Rayendra Elven,S.Si,M.S.E,MA**
Jabatan : **Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Misni, S.K.M., M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,

**Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

**Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

A blue ink signature of Raymond Rayendra Elven, S.Si, M.S.E, MA, written in a cursive style.



Raymond Rayendra Elven, S.Si, M.S.E, MA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198112112006041008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BIDANG RISET DAN INOVASI DAERAH
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	Persentase Hasil Riset yang direkomendasikan	100%
		1. Jumlah Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	3 Dokumen
		a. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan
		b. Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	1 Laporan
		c. Jumlah Dokumen Data Kelitbang dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen
2.	Indeks Inovasi Daerah	1. Jumlah Pengembangan Inovasi dan Teknologi	1 Laporan
		a. Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan
3.	Indeks Perencanaan Pembangunan	Persentase konsistensi Program dan Kegiatan RKPD dengan APBD	90%
		Persentase capaian hasil Evaluasi RKPD	90%
		1. Jumlah Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Dokumen
		a. Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	1 Dokumen

Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 743.490.996,43	P APBD
a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan		
• Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Rp. 160.217.150,04	
• Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Rp. 215.169.981,47	
• Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kelitbangsaan dan Peraturan	Rp. 175.692.964,51	
b. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi		
• Sub Kegiatan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Rp. 192.410.900,41	
2. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp. 22.298.883,01	P APBD
a. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah		
• Sub Kegiatan Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp. 22.298.883,01	

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau

Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

**Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**



Raymond Rayendra Elven,S.Si,M.S.E,MA
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP 198112112006041008



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA

TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini ;

Nama : **Nanny Nurviani, S.Sos**
Jabatan : **Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi
Kepulauan Riau**

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Misni, S.K.M., M.Si**
Jabatan : **Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,
**Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau**


**Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007**




**Nanny Nurviani, S.Sos
Penata (III/c)
NIP 198807042015032003**

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
**KASUBBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
 DAN PENGEMBANGAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	Persentase capaian Indikator Kinerja Bidang Urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan	100 %
		1. Persentase Pemenuhan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen
		b. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen
		c. Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan
		d. Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan
		2. Persentase Pemenuhan Administrasi Barang Milik Daerah	100 %
		a. Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan
		3. Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %
		a. Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket
		b. Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket
		c. Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket
		d. Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket
		e. Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		f. Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan
		g. Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan
		4. Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %
		a. Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	150 Unit
		5. Persentase Pemenuhan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		a. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan
		b. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan
		c. Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan
		6. Persentase Pemenuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %
		a. Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	8 Unit
		b. Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	30 Unit
		c. Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1076 Unit
		d. Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit

Kegiatan/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 6,058,790,083,77	P APBD
a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		
• Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Rp. 33.026.200,00	
• Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Rp. 38.733.000,00	
• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 27.803.600,00	
• Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Rp. 19.201.800,00	
b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
• Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rp. 726.000,00	
c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 58.993.725,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 99.994.905,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 249.994.023,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Rp. 233.551.770,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp. 85.360.000,00	
• Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 227.015.955,00	
• Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 711.730.000,00	
d. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
• Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 76.203.848,00	

Kegiatan/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
--------------------------------	----------	------------

e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 12.550.000,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 82.890.000,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp.2.609.211.283,77	
f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 78.757.900,00	
• Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 396.329.650,00	
• Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 49.621.000,00	
• Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 967.095.424,00	

Tanjungpinang, 7 Oktober 2024

Pihak Kedua,

Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan
Provinsi Kepulauan Riau

Misni, S.K.M., M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP 197305161999032007

Pihak Pertama,

Kasubbag Umum dan Kepegawaian
Badan Perencanaan Penelitian dan
Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau



Nanny Nurviani, S.Sos
Penata (III/c)
NIP 198807042015032003